

PEMERINTAH
KOTA JAMBI



LAPORAN KINERJA 2022





LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

TAHUN 2022



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pemerintah Kota Jambi yang dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 merupakan laporan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang berisi capaian kinerja indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Jambi beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP, inovasi pencapaian kinerja serta penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam perbaikan kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi ini dapat memberikan manfaat baik pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kota Jambi.

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Januari 2023

WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, maka laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dibuat oleh setiap daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Jambi selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita-cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dengan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2022 masuk dalam kategori "Sangat Tinggi", karena rata-rata capaiannya 108,75% semua capaian indikator mendapatkan kategori Sangat Tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah Kota Jambi secara keseluruhan berhasil melaksanakan visi dan misi Kota Jambi. Untuk mencapai target tersebut di alokasikan dana sebesar Rp. 1.812.932.658.629,00, terealisasi sebesar Rp 1.622.847.922.178,57.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Jambi, yang akan terus dipelihara dan akan terus ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang

**CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI
TAHUN 2022 MASUK DALAM KATEGORI
"SANGAT TINGGI"**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	2,79	93
		2.	Nilai SAKIP	B	B	100
		3.	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (B)	4,205 (A-)	105,38
2.	Menurunkan Tingkat Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERWAL	4.	Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan	84%	91,30%	108,69
3.	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63.31%	63,77%	100,73
4.	Meningkatnya Kualitas Air	6.	Indeks Kualitas Air	39.9	42,50	106,52
5.	Meningkatnya Kualitas Udara	7.	Indeks Kualitas Udara	80.76	88,09	109,08
6.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.87	49,92	111,25
7.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9.	Indeks Ketahanan Pangan	80	77,50*	96,87
8.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	13,56%	150,67
9.	Meningkatkan Realisasi Investasi	11.	Realisasi Investasi	498,35 M	744,785 M	149,45
10.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,8	8,95	108,85
11.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	13.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,81	72,99	100,25
12.	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,38	15,38	100
13.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4	67,88 (2021)	99,24
14.	Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan	16.	Indeks Pembangunan Pemuda	57,95	57,96	100,02
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEMERINTAH KOTA JAMBI				108,75%	SANGAT TINGGI	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI.....	3
1.2. PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA JAMBI.....	4
1.3. PEREKONOMIAN KOTA JAMBI.....	5
1.4. SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA JAMBI.....	6
1.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RPJMDP KOTA JAMBI 2018-2023.....	13
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022	41
3.2. AKUNTABILITAS REALISASI ANGGARAN.....	107
BAB IV PENUTUP	120
LAMPIRAN	



LAPORAN KINERJA 2022 PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

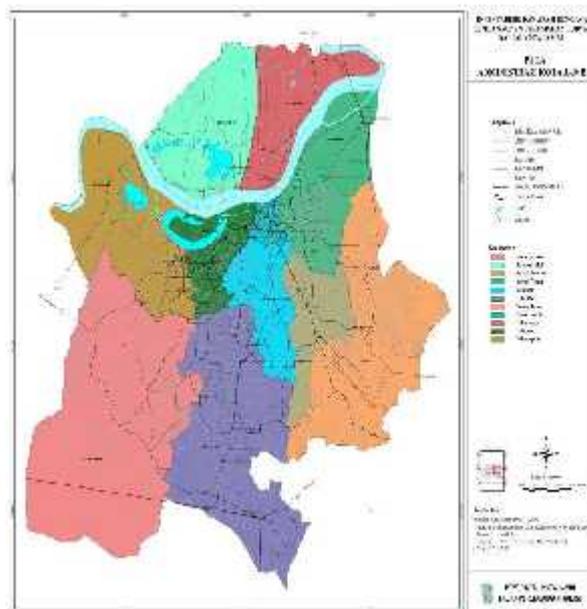
1.1 GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur.

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.88,67 Km².

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kota Jambi



Sumber : BPS Kota Jambi 2021.

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2021 berdasarkan hasil perapihan umur dari data administratif dan sensus Penduduk 2020 adalah sebanyak 612.162 jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (sex ratio: 101,5). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

NO	PENDUDUK	JUMLAH			
		2019	2020	2021	2022
1.	LAKI-LAKI	303.818	305.407	308.155	311.616
2.	PEREMPUAN	300.920	300.793	304.007	307.937
	JUMLAH	591.134	604.738	612.162	619.553

Sumber : Diolah dari BPS Kota Jambi Dalam Tahun 2022

1.2 PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA JAMBI

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2020



Sumber: BPS Kota Jambi 2021



1.3 PEREKONOMIAN KOTA JAMBI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Jambi pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2010, pada Tahun 2021 sebesar 19,515 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 18,776 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,94 persen, mengalami laju kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -3,96 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,95 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,89 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,48 persen; kategori Konstruksi sebesar 5,04 persen. Hampir semua kategori ekonomi PDRB pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif yang menandakan pulihnya sektor ekonomi setelah tahun sebelumnya terdampak pandemi covid-19. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar -12,21 persen. Pertumbuhan negatif ini salah satunya disebabkan berhenti produksi peternakan ayam pedaging yang tidak diijinkan beroperasi di Kota Jambi. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif diatas satu persen, yaitu kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,70 persen, kategori Jasa perusahaan sebesar 4,35 persen, kategori Informasi dan komunikasi sebesar 3,99 persen, kategori Real estate sebesar 3,19 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,15 persen, kategori Pertambangan dan penggalian sebesar 2,54 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,45 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 2,17 persen. Kategori berikutnya tetap tumbuh positif tetapi tumbuhnya dibawah satu persen yaitu kategori Jasa lainnya tumbuh 0,85 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,26 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,24 persen, dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,16 persen.

Tabel 1.2
Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2020-2021

LAPANGAN USAHA		2020*	2021**
(1)		(2)	(3)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,17	0,98
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,5
C.	Industri Pengolahan	10,83	11,02
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	0,24
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,26
F.	Konstruksi	9,48	9,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,26	32,70
H.	Transportasi dan Pergudangan	8,57	7,98
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,32	2,22
J.	Informasi dan Komunikasi	5,28	5,09
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,23	6,33
L.	Real Estate	2,68	2,62
M,N.	Jasa Perusahaan	3,03	3,05
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,14	8,41
P.	Jasa Pendidikan	4,94	4,65
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,60	2,81
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,70	0,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRITO		100,00	100,00

Sumber BPS Kota Jambi

1.4 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA JAMBI

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Jambi mengacu kepada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Jambi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bidang pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;



11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperluas. Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD.

1.4.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Struktur Organisasi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi dimaksud di atas, jumlah organisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah, 11 (sebelas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
- b. Inspektorat
- c. Dinas Daerah
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
 8. Dinas Lingkungan Hidup
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10. Dinas Perhubungan
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika
 12. Dinas tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 20. Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Badan Daerah
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Kecamatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	<u>Kecamatan Pasar</u>	<ol style="list-style-type: none">a. Kelurahan Pasarb. Kelurahan Orang Kayo Hitamc. Kelurahan Beringind. Kelurahan Sungai Asam
2.	<u>Kecamatan Telanaipura</u>	<ol style="list-style-type: none">a. Kelurahan Telanaipurab. Kelurahan Simpang IV Sipinc. Kelurahan Teluk Kenalid. Kelurahan Buluran Kenalie. Kelurahan Penyengat Rendahf. Kelurahan Pematang Sujur
3.	<u>Kecamatan Jambi Timur</u>	<ol style="list-style-type: none">a. Kelurahan Tanjung Sarib. Kelurahan Tanjung Pinangc. Kelurahan Rajawalid. Kelurahan Talang Banjare. Kelurahan Sijenjangf. Kelurahan Budimang. Kelurahan Kasangh. Kelurahan Sulanjanai. Kelurahan Kasang Jaya



NO	KECAMATAN	KELURAHAN
4.	<u>Kecamatan Jambi Selatan</u>	a. Kelurahan The Hok b. Kelurahan Pasir Putih c. Kelurahan Pakuan Baru d. Kelurahan Tambak Sari e. Kelurahan Wijayapura
5.	<u>Kecamatan Jelutung</u>	a. Kelurahan Jelutung b. Kelurahan Payo Lebar c. Kelurahan Lebak Bandung d. Kelurahan Kebun Handil e. Kelurahan Talang Jauh f. Kelurahan Cempaka Putih g. Kelurahan Handil Jaya
6.	<u>Kecamatan Kota Baru</u>	a. Kelurahan Paal Lima b. Kelurahan Suka Karya c. Kelurahan Kenali Asam Atas d. Kelurahan Kenali Asam Bawah e. Kelurahan Simpang III Sipin
7.	<u>Kecamatan Danau Teluk</u>	a. Kelurahan Olak Kemang b. Kelurahan Ulu Gedong c. Kelurahan Pasir Panjang d. Kelurahan Tanjung Raden e. Kelurahan Tanjung Pasir
8.	<u>Kecamatan Pelayangan</u>	a. Kelurahan Tengah b. Kelurahan Jelmu c. Kelurahan Arab Melayu d. Kelurahan Mudung Laut e. Kelurahan Tahtul Yaman f. Kelurahan Tanjung Johor
9.	<u>Kecamatan Paal Merah</u>	a. Kelurahan Eka Jaya b. Kelurahan Lingkar Selatan c. Kelurahan Paal Merah d. Kelurahan Talang Bakung e. Kelurahan Payo Silincah
10.	<u>Kecamatan Alam Barajo</u>	a. Kelurahan Bagan Pete b. Kelurahan Beliang c. Kelurahan Kenali Besar d. Kelurahan Mayang Mangurai e. Kelurahan Rawasari



NO	KECAMATAN	KELURAHAN
11.	<u>Kecamatan Danau Sipin</u>	a. Kelurahan Legok b. Kelurahan Murni c. Kelurahan Selamat d. Kelurahan Solok Sipin e. Kelurahan Sungai Putri

Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

1.4.2 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat adalah sebanyak 5.189.

Tabel 1.3
Jumlah ASN di Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.590 Orang
2	Perempuan	3.643 Orang
Total		5.233 Orang

Sumber: BKPSDMD Desember Tahun 2022

I.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Infrastruktur Publik, Permukiman dan Lingkungan Hidup;



4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat;
5. Tata Nilai Kehidupan Masyarakat dan Kebudayaan Daerah;
6. Pengarusutamaan Gender dan Ketahanan Keluarga;
7. Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Efisiensi, Transparan dan Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi.



LAPORAN KINERJA 2022 PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMDP KOTA JAMBI 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna :

Pusat Perdagangan dan Jasa :	Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
Berbasis Masyarakat :	Community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak :	Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya :	Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima :	Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;



3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung dan manajemen. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi terlebih dahulu keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

Visi	MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA
Misi 1	PENGUATAN BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Misi 2	PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT
Misi 3	PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN
Misi 4	PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN
Misi 5	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
1.	Pengoptimalisasian Penegakan Produk Hukum Daerah	Utama	JBI.1
2.	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Utama	JBI.2
3.	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Utama	JBI.3
4.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Utama	JBI.4
5.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Utama	JBI.5
6.	Peningkatan Derajat Kesehatan	Utama	JBI.6
7.	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Utama	JBI.7
8.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pendukung/Manajerial	JBI.8
9.	Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pendukung/Manajerial	JBI.9
10.	Pengelolaan Teknologi	Pendukung/Manajerial	JBI.10
11.	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Pendukung/Manajerial	JBI.11
12.	Pengelolaan Anggaran	Pendukung/Manajerial	JBI.12



Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah

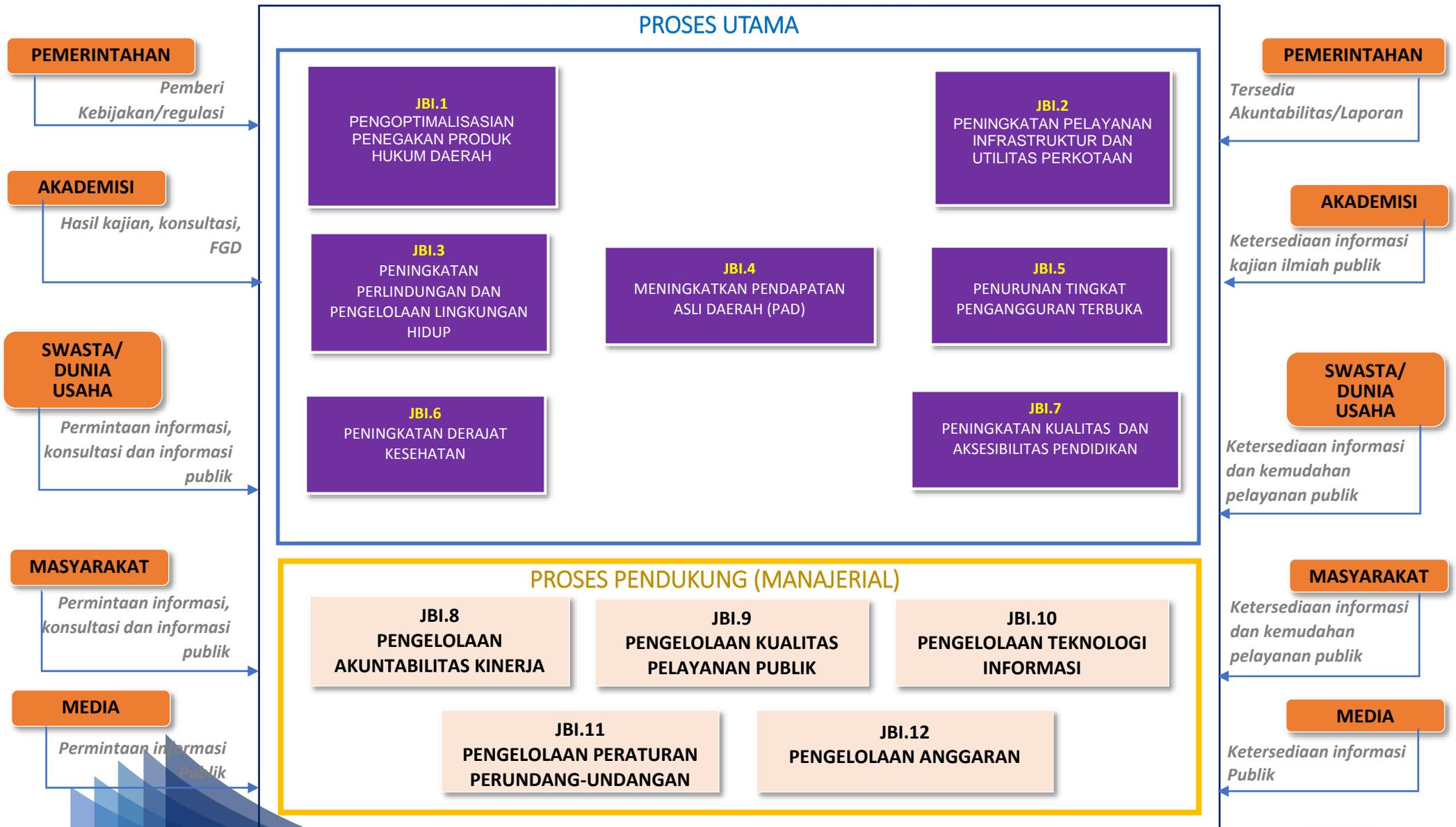
Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima	1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informatika	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
					Indeks Profesional ASN
					Nilai SAKIP
	2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)
					Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan Aman	Meningkatkan Jumlah Kasus Kebakaran dan Kebencanaan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan Pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran
					Persentase Pembinaan kTerhadap Masyarakat Terkait Ideologi Pancasila
	3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase Orkemas dan Parpol yang Berperan Aktif di Masyarakat
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan
					Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
					Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan
					Penurunan Luasan Kawasam Genangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi	Terjaganya Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi	Laju Inflasi	



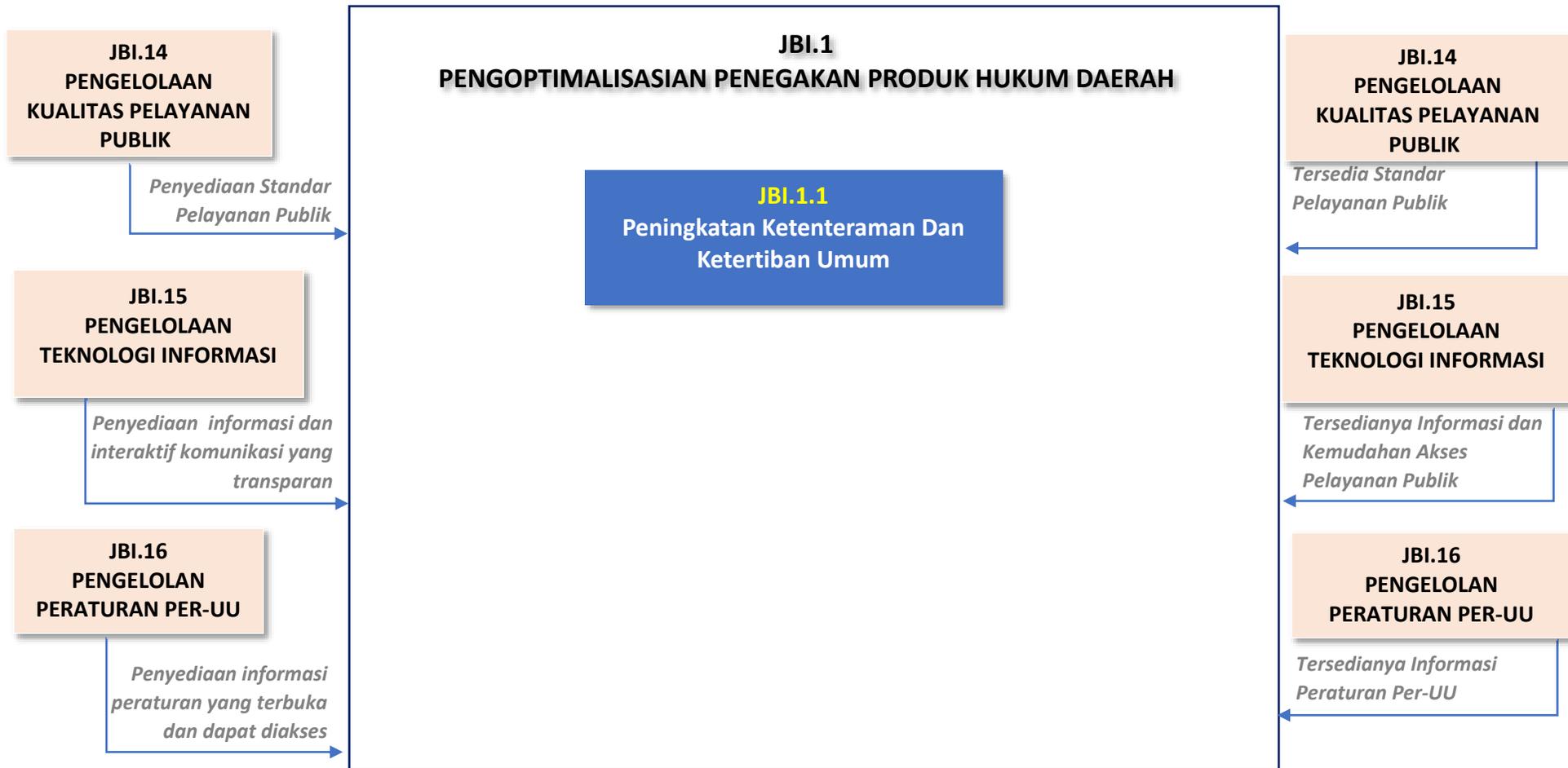
Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	
	Perkotaan	Ekonomi		Kota Jambi		
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontibusi Pariwisata terhadap PDRB	
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	
				Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas	
	5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Kualitas Masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berbudaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)
					Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata –rata Lama Sekolah
					Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
					Indeks Pembangunan Gender	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera
					Kriteria Kota Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender
					Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Kesetaraan Gender
						Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				
	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda				
	Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan Angka PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani			

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022



SUB PROSES BISNIS JBI.1 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022

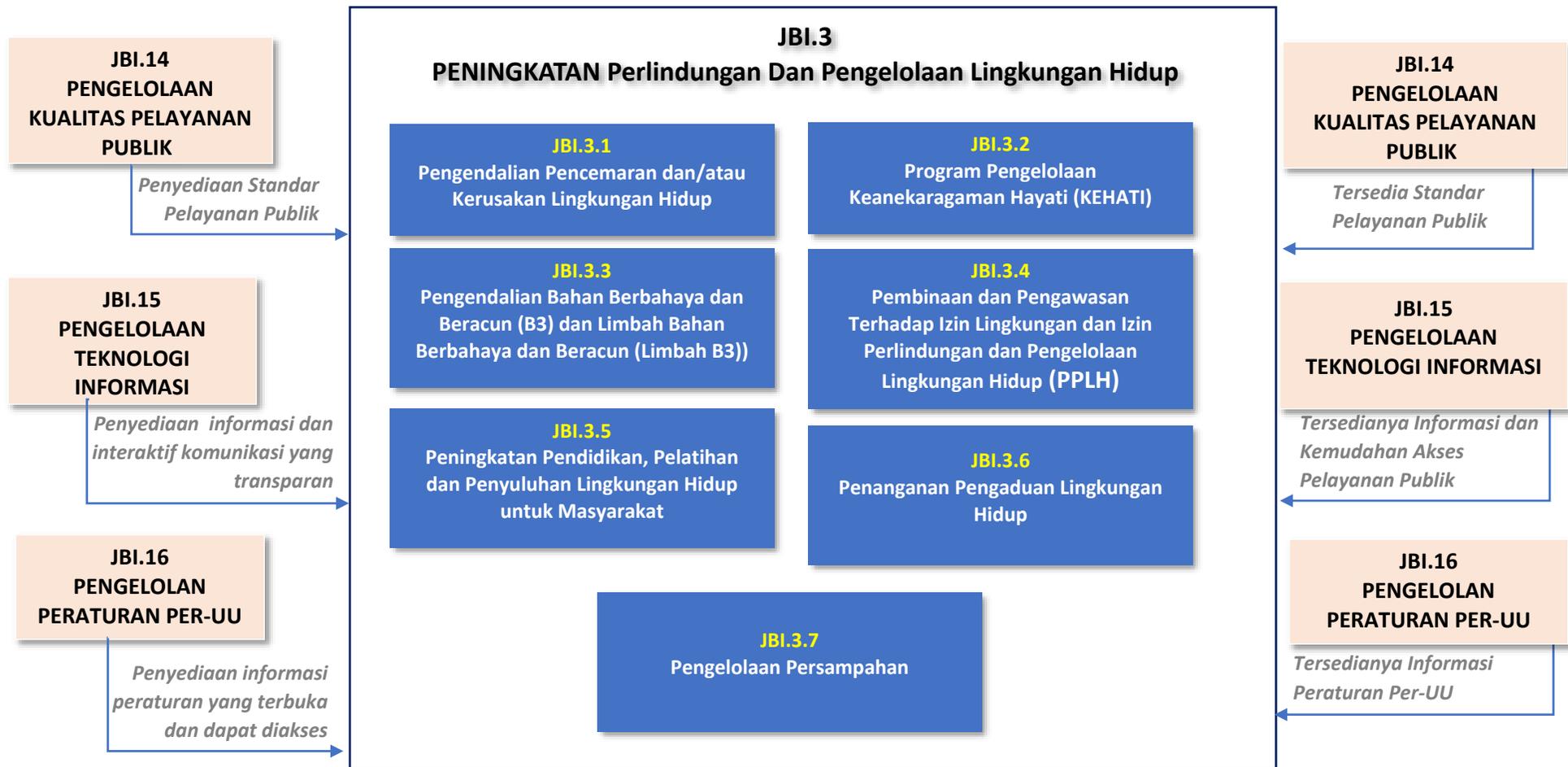


SUB PROSES BISNIS JBI.2 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022



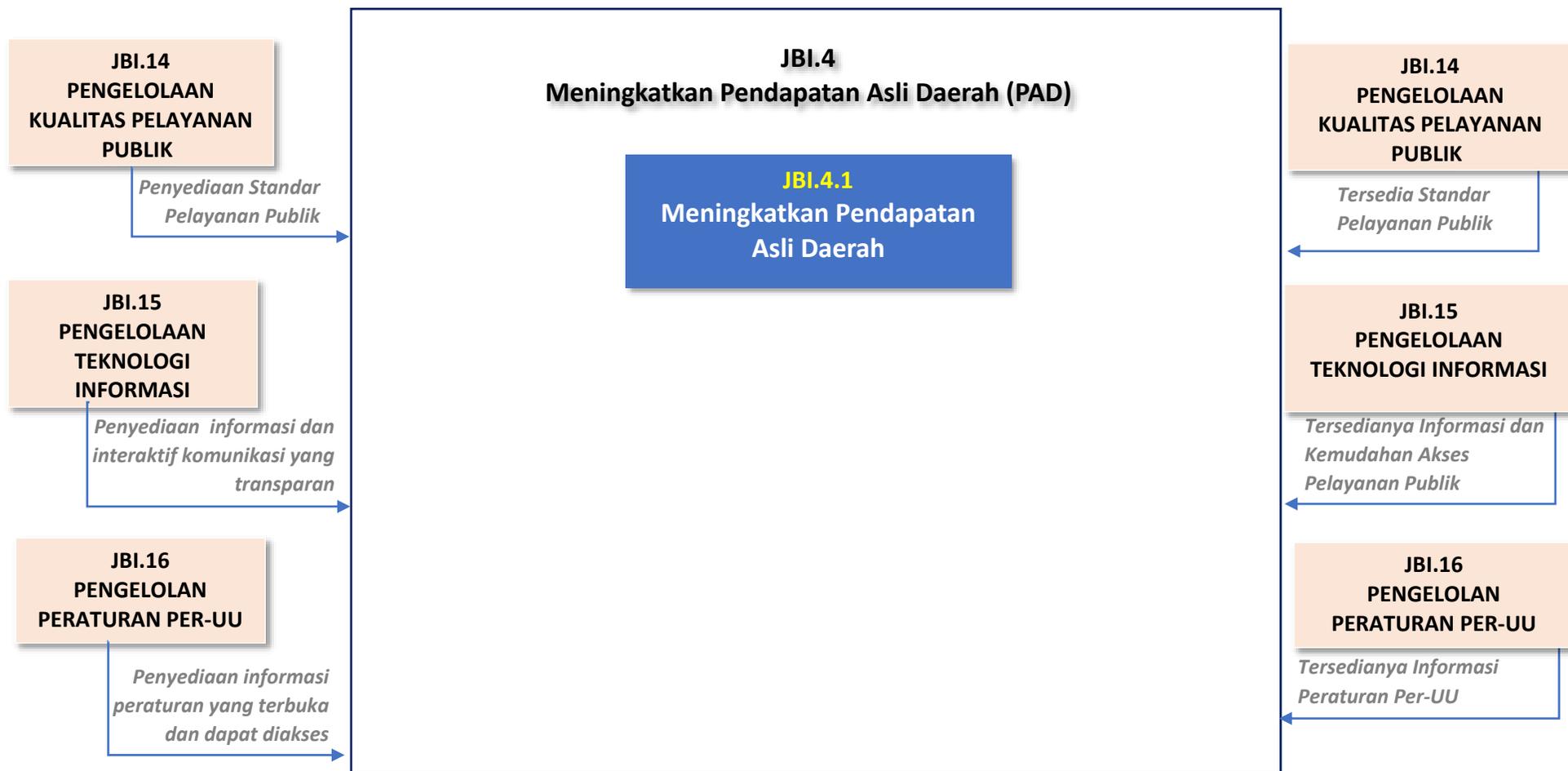


SUB PROSES BISNIS JBI.3 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022



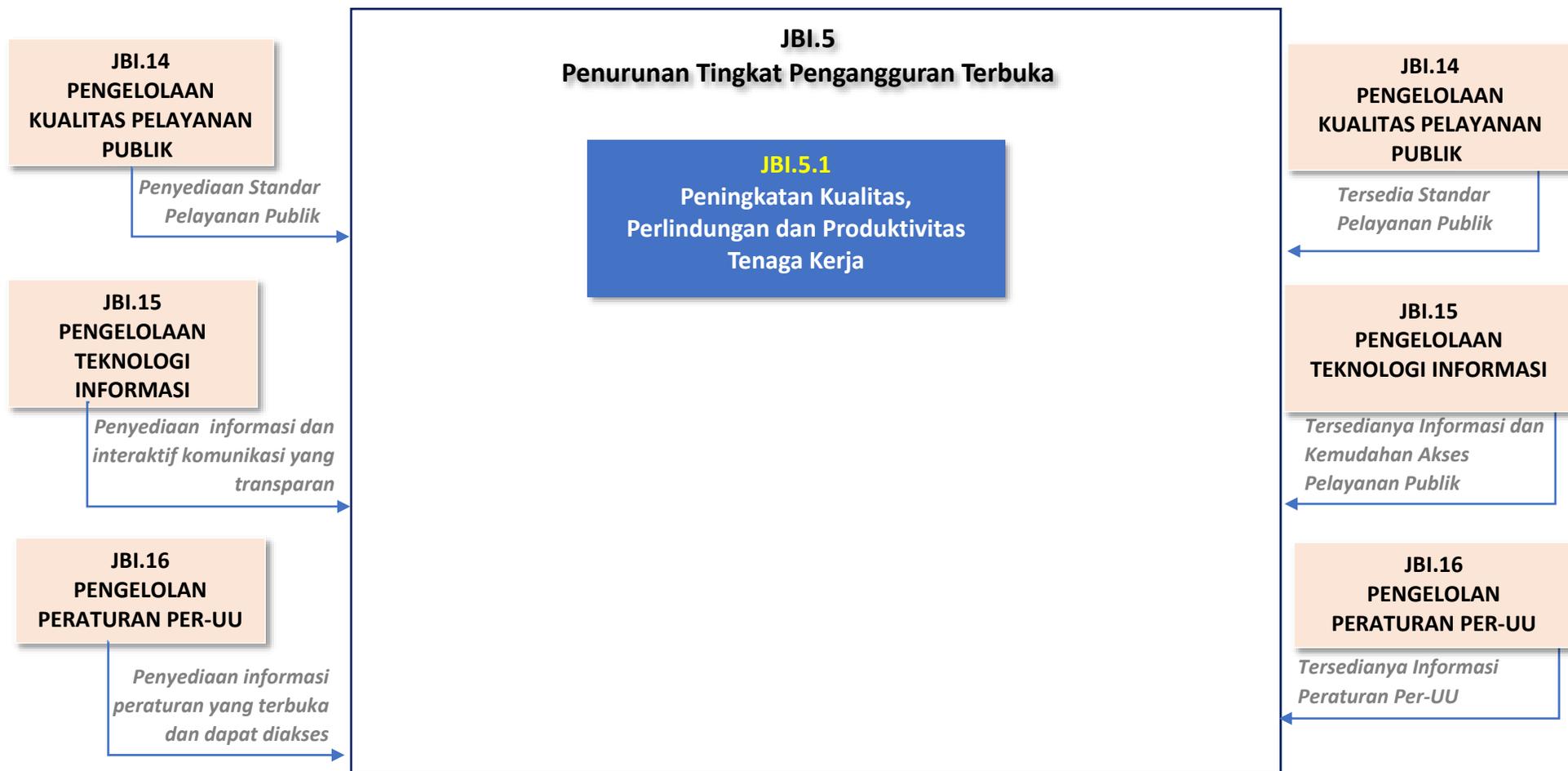


SUB PROSES BISNIS JBI.4 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022



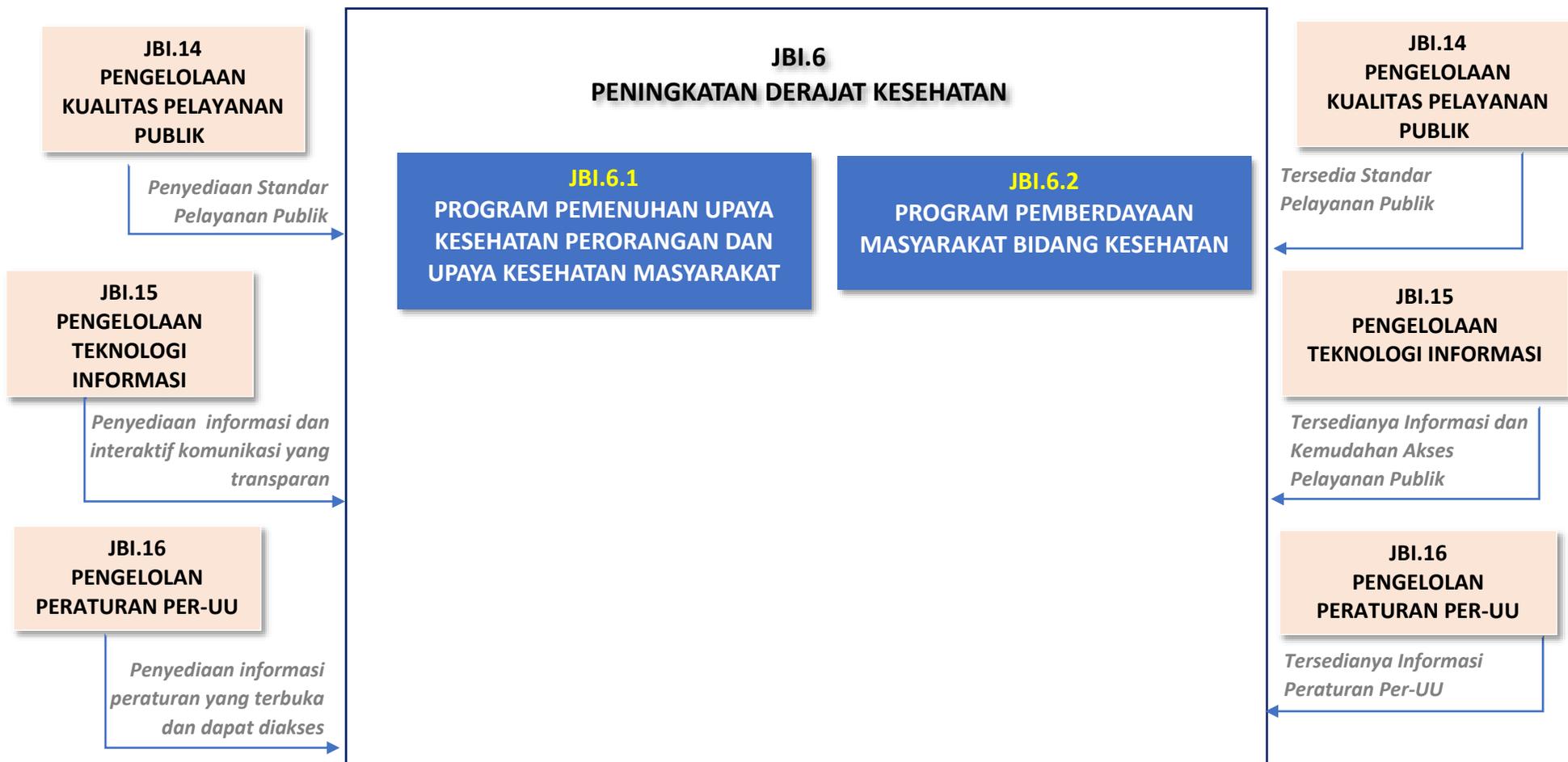


SUB PROSES BISNIS JBI.5 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022





SUB PROSES BISNIS JBI.6 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022



SUB PROSES BISNIS JBI.7 PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022





PETA RELASI PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022

PROSES
UTAMA

JBI.1

PENURUNAN TINGKAT PELANGGARAN
TERHADAP PERDA DAN PERWAL

SATPOL PP

SETDA

PERANGKAT
DAERAH

JBI.2

PENINGKATAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS

DPUPR

DISHUB

PERANGKAT
DAERAH

DPERKIM

JBI.3

PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN

DLH

SETDA

KECAMATAN
KELURAHAN

JBI.4

PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)

BPPRD

SETDA

PERANGKAT
DAERAH

JBI.5

PENURUNAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA

DTKK

KECAMATAN
KELURAHAN

PERANGKAT
DAERAH

JBI.6

PENINGKATAN DERAJAT
KESEHATAN

DINKES

KECAMATAN
KELURAHAN

JBI.7

PENINGKATAN KUALITAS DAN
AKSESIBILITAS PENDIDIKAN

DISDIK

DKP

SETDA

PROSES
PENDUKUNG
(MANAJERIAL)

JBI.8

PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS

BKPSDMD

JBI.9

PENGELOLAAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

JBI.10

PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI

DISKOMINFO

JBI.11

PENGELOLAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

JBI.12

PENGELOLAAN ANGGARAN

BPKAD

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran				
Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima	1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informatika	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
					Indeks Profesional ASN				
					Nilai SAKIP				
					Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)				
	2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan			
						Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan Aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran
									Persentase Pembinaan KTerhadap Masyarakat Terkait Ideologi Pancasila
	3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase Orkemas dan Parpol yang Berperan Aktif di Masyarakat			
						Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	
								Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditandatangani	
								Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	
								Luasan Kawasan Genangan	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	
									Indeks Kualitas Udara
									Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan								
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Laju Inflasi				
					Indeks Ketahanan Pangan				



Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontibusi Pariwisata terhadap PDRB
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi
				Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas Persentase Daya Saing Produk IKM Persentase Koperasi Berkualitas
	5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berbudaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata –rata Lama Sekolah
				Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan Angka PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 telah ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 15 November 2022, sehubungan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Target yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
		2	Nilai SAKIP	B
		3	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (B)
2	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	84%
3	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan Perkotaan	5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63.31%
4	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6	Indeks Kualitas Air	39,9
		7	Indeks Kualitas Udara	80,76
		8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,87
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9	Indeks Ketahanan Pangan	80
6	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
7	Meningkatkan Realisasi Investasi	11	Realisasi Investasi	498.35 M
8	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,8
9	Meningkatkan derajat kesehatan	13	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,81
10	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.38
11	Meningkatkan kesetaraan gender	15	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4
12	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	16	Indeks Pembangunan Pemuda	57,95

Jumlah Program dan anggaran untuk mendukung realisasi target kinerja Pemerintah Kota Jambi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Program
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan
				Program Kepegawaian Daerah
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Program Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Aplikasi Informatika
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
		Program Aplikasi Informatika		
		Program Aplikasi Informatika		
		Program Aplikasi Informatika		
2.		2.	Nilai SAKIP	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3.		3.	Indeks Pelayanan Publik	Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Program Aplikasi Informatika
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pendaftaran Penduduk
				Program Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Pelayanan Penanaman Modal				
2.	Menurunkan Tingkat Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERWAL	4.	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
3.	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan Perkotaan	5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	Meningkatnya Kualitas Air	6.	Indeks Kualitas Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Pengelolaan Persampahan
5.	Meningkatnya Kualitas Udara	7.	Indeks Kualitas Udara	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				Program Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang



				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
7.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9.	Indeks Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Aplikasi Informatika
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
9.	Meningkatkan Realisasi Investasi	11.	Realisasi Investasi	Program Aplikasi Informatika
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Jalan				
10.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
				Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Program Pengembangan UMKM
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi				



				Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Hubungan Industrial Program Penempatan Tenaga Kerja Program Informasi dan Komunikasi Publik
11.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	13.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
12.	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengelolaan Pendidikan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Pendidikan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Pembinaan Perpustakaan
13.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	15.	Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Perlindungan Perempuan Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemberdayaan Sosial Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Pendidikan
14.	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	16.	Indeks Pembangunan Pemuda	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	313.490.031.893,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	158.763.917.938,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	28.919.870,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	79.392.800,00
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	132.326.207,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.296.204.113,00
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.631.791.662,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.652.278.165,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	685.384.826,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.599.364,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.357.093.343,00
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	31.052.932.890,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.959.483.620,00
14	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.776.842.025,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.099.334.849,00
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.358.967.500,00
17	Program Pengembangan Permukiman	47.165.247.879,00
18	Program Penataan Bangunan Gedung	148.069.062.057,00
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.658.407.221,00
20	Program Penyelenggaraan Jalan	56.708.919.400,00
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.950.513.029,00
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.661.413.300,00
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.470.995.868,00
24	Program Pengembangan Perumahan	1.070.703.191,00
25	Program Kawasan Permukiman	5.812.315.558,00
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	29.389.501.042,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
27	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.619.495,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.140.851.793,00
29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.202.807.820,00
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.931.015.360,00
31	Program Penanggulangan Bencana	696.420.693,00
32	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.587.076.469,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.098.601.978,00
34	Program Pemberdayaan Sosial	1.660.545.670,00
35	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	85.208.310,00
36	Program Rehabilitasi Sosial	1.291.283.581,00
37	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.126.175.808,00
38	Program Penanganan Bencana	737.859.710,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.815.862.516,00
40	Program Perencanaan Tenaga Kerja	105.605.512,00
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.424.947.159,00
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	204.630.599,00
43	Program Hubungan Industrial	376.189.361,00
44	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	765.422.308,00
45	Program Perlindungan Perempuan	365.119.900,00
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	173.310.200,00
47	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	262.520.254,00
48	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	338.626.759,00
49	Program Perlindungan Khusus Anak	604.606.251,00
50	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442.726.150,00
51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	98.996.110,00
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	493.154.756,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.736.817.156,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	14.776.080,00
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.828.778.165,00
56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.783.655.760,00
57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100.130.521,00
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	375.281.111,00
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	166.530.405,00
60	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	123.154.601,00
61	Program Pengelolaan Persampahan	32.101.551.442,00
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.171.722.929,00
63	Program Pendaftaran Penduduk	273.673.290,00
64	Program Pencatatan Sipil	339.557.215,00
65	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.213.547.694,00
66	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.875.031.975,00
68	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.655.201.552,00
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.398.661.456,00
70	Program Pengendalian Penduduk	250.971.951,00
71	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.697.299.991,00
72	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.825.447.106,00
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.675.873.466,00
74	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	11.990.483.959,00
75	Program Pengelolaan Pelayaran	156.305.400,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.199.463.343,00
77	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.842.432.286,00
78	Program Aplikasi Informatika	3.695.591.990,00
79	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	33.443.984,00
80	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	592.859.498,00
81	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	148.033.430,00
82	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	3.319.837.164,00
83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.159.765.737,00
84	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.323.400,00
85	Program Promosi Penanaman Modal	233.758.660,00
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.968.349,00
87	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	659.549.441,00
88	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.222.759,00
89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.125.760.200,00
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.494.830.000,00
91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.568.074.180,00
92	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.139.930.616,00
93	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	85.317.516,00
94	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.800.300,00
95	Program Pengembangan Kebudayaan	949.199.222,00
96	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	97.296.190,00
97	Program Pembinaan Sejarah	121.404.970,00
98	Program Pembinaan Perpustakaan	820.320.613,00
99	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	109.413.515,00
100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.653.390.978,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
101	Program Pengelolaan Arsip	736.843.362,00
102	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	265.435.828,00
103	Program Perizinan Penggunaan Arsip	7.482.679,00
104	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	73.255.200,00
105	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	439.175.881,00
106	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	97.214.413,00
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.158.035.410,00
108	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	988.777.564,00
109	Program Pemasaran Pariwisata	1.185.940.647,00
110	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.038.998.820,00
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.566.059.712,00
112	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.966.977.449,00
113	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	70.000.000,00
114	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	930.057.165,00
115	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	104.232.560,00
116	Program Penyuluhan Pertanian	413.336.845,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.647.271.847,00
118	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	89.524.300,00
119	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.561.135.229,00
120	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.017.773.446,00
121	Program Pengembangan Ekspor	79.347.196,00
122	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	117.554.090,00
123	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	989.779.458,00
124	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.479.327.215,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
125	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	63.744.234,00
126	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	48.642.985,00
127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.816.816.728,00
128	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	26.511.730.716,00
129	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.941.259.344,00
130	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.453.209.450,00
131	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	37.349.313.539,00
132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.342.161.253,00
133	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.121.299.264,00
134	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.211.019.387,00
135	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.246.364.997,00
136	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.538.905.228,00
137	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.180.555.039,00
138	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.659.284.219,00
139	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.472.225.738,00
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.733.062,00
141	Program Kepegawaian Daerah	2.259.913.048,00
142	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.294.131.175,00
143	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	683.358.616,00
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.209.047.866,00
145	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.227.345.000,00
146	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.126.175.000,00
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.939.737.978,00
148	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	333.717.315,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.216.007.137,00
150	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	463.900.450,00
151	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	526.264.450,00
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.277.776.772,00
153	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.994.331.129,00
154	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.926.121.740,00
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	227.608.377,00
156	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	643.972.533,00
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.306.421.286,00
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	217.213.870,00
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.743.826.088,00
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	525.085.150,00
161	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	368.032.580,00
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.501.165.103,00
163	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	313.651.000,00
164	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.665.335.270,00
165	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	582.387.635,00
166	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	460.157.301,00
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.842.041.770,00
168	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.324.853.111,00
169	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.410.106.592,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
170	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	499.671.800,00
171	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	211.252.500,00
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.691.195.226,00
173	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.851.500,00
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.989.726.850,00
175	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	694.050.900,00
176	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.288.711.700,00
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.949.023.879,00
178	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.423.140,00
179	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.095.742.054,00
180	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	364.884.998,00
181	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	339.971.499,00
182	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.137.512.507,00
183	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	147.758.735,00
184	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.963.385.022,00
185	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.649.700,00
186	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.413.500,00
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.937.564.648,00
188	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	691.880.276,00
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.304.408.497,00
190	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	430.189.000,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
191	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351.895.300,00
192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.741.567.172,00
193	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	420.678.810,00
194	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.592.715.446,00
195	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	433.035.800,00
196	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.121.450,00
197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.325.739.801,00
198	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	128.761.090,00
199	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.798.437.387,00
200	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.228.550,00
201	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	463.234.099,00
202	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.084.228,00
203	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	315.403.000,00
204	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.487.851.066,00
205	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	716.650.000,00
206	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	248.069.000,00
207	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	134.651.000,00
TOTAL		1.812.932.658.629,00



**LAPORAN KINERJA 2022
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi dilakukan secara berkala secara tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dengan menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T.E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017



A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2022 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan strategis dan rencana kinerja tahun 2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		2022			KATEGORI
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	2,79	93	Sangat Tinggi
		2.	Nilai SAKIP	B	B	100	Sangat Tinggi
		3.	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (B)	4,205 (A-)	105,38	Sangat Tinggi
2.	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	4.	Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan	84%	91,30%	108,69	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63.31%	63,77%	100,73	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6.	Indeks Kualitas Air	39.9	42,50	106,52	Sangat Tinggi
		7.	Indeks Kualitas Udara	80.76	88,09	109,08	Sangat Tinggi
		8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.87	49,92	111,25	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9.	Indeks Ketahanan Pangan	80	77,50*	96,87	Sangat Tinggi
6.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	13,56%	150,67	Sangat Tinggi
7.	Meningkatkan Realisasi Investasi	11.	Realisasi Investasi	498,35 M	744,785 M	149,45	Sangat Tinggi
8.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,8	8,95	108,85	Sangat Tinggi
9.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	13.	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,81	72,99	100,25	Sangat Tinggi
10.	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,38	15,38	100	Sangat Tinggi
11.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4	67,88 (2021)	99,24	Sangat Tinggi
12.	Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan	16.	Indeks Pembangunan Pemuda	57,95	57,96	100,02	Sangat Tinggi
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEMERINTAH KOTA JAMBI				108,75%	SANGAT TINGGI		



B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020,2021 dan 2022

Indikator Kinerja Utama		2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,55	-	-	2,9	1,69	58,27	3	2,79	93
2.	Nilai SAKIP	B	B	100	B	B	100	B	B	100
3.	Indeks Pelayanan Publik	-	3,98 (B)	-	-	3,97 (B)	-	3,99 (B)	4,205 (A-)	105,38
4.	Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan	80	75	93,75	81	90,48	111,70	84%	91,30%	108,69
5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	60,77	65,56	107,88	56,38	74,76	132,60	63.31%	63,77%	100,73
6.	Indeks Kualitas Air	38,30	39,60	103,40	39,75	43,99	110,6	39.9	42,50	106,52
7.	Indeks Kualitas Udara	80,72	84,51	104,70	80,74	85,02	105,3	80.76	88,09	109,08
8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,70	44,82	107,48	44,85	49,91	111,3	44.87	49,92	111,25
9.	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	78	79,73	102,22	80	77,50*	96,87
10.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	-9,64	-107,11	9	7,97	88,55	9%	13,56%	150,67
11.	Realisasi Investasi	430,5 M	249,4 M	68,39	474,62 M	653,17 M	137,62	498,35 M	744,785 M	149,45
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	10,37	10,66	97,2	9,8	8,95	108,85
13.	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,35	72,65	100,41	72,73	72,71	99,97	72,81	72,99	100,25
14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,61	15,10	103,35	15,11	15,37	101,72	15,38	15,38	100
15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,20	69,83	102,39	68,30	67,88	99,39	68,4	67,88 (2021)	99,24
16.	Indeks Pembangunan Pemuda	50,50	50,50	100	57,9	57,91	100	57,95	57,96	100,02

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan membandingkan target beserta realisasi sehingga di ketahui capaian kinerja indikator.



C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Capaian Perbandingan Target Akhir, 2021 dan 2022

Indikator Kinerja Utama		2022			Target Akhir RPJMDP 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi sampai 2022	Capaian
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	2,79	93	3,2	2,79	87,19
2.	Nilai SAKIP	B	B	100	BB	B	50
3.	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (B)	4,205 (A-)	105,38	4,05 (A-)	4,205 (A-)	103,83
4.	Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan	84%	91,30%	108,69	88	91,30%	103,75
5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63.31%	63,77%	100,73	70,99%	63,77%	89,83
6.	Indeks Kualitas Air	39.9	42,50	106,52	40,2	42,50	105,72
7.	Indeks Kualitas Udara	80.76	88,09	109,08	80,8	88,09	109,02
8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.87	49,92	111,25	44,92	49,92	111,13
9.	Indeks Ketahanan Pangan	80	77,50*	96,87	84	77,50*	92,26
10.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	13,56%	150,67	9%	13,56%	150,67
11.	Realisasi Investasi	498,35 M	744,785 M	149,45	575,70 M	744,785 M	129,37
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,8	8,95	108,85	8,98	8,95	93,85
13.	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,81	72,99	100,25	72,97	72,99	100,03
14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,38	15,38	100	15,40	15,38	99,87
15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4	67,88 (2021)	99,24	68,50	67,88 (2021)	99,09
16.	Indeks Pembangunan Pemuda	57,95	57,96	100,02	58,5	57,96	99,08
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA				108,75%			101,54%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 dengan membandingkan target akhir Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan hasil rata-rata capaian Sangat Tinggi.



D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bentuk transformasi dari sistem pemerintahan secara manual menjadi e-government. Baik itu pelayanan publik maupun layanan internal pemerintahan. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB, dimana diawali dengan penilaian mandiri oleh Pemerintah Kota Jambi terhadap 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator yang kemudian hasil penilaian mandiri tersebut divalidasi ulang oleh Kementerian PANRB.

Implementasi SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Pemerintah secara lebih efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1503 Tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi 1,69 (predikat buruk). Hal ini disebabkan adanya penambahan instrumen baru yang semula 3 Domain, 7 Aspek, 37 Indikator menjadi 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator.

Indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.79 (predikat baik) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Peningkatan sebesar 1.1 poin ini dikarenakan Pemerintah Kota Jambi telah melakukan perbaikan yang berupa menyiapkan berbagai regulasi/ peraturan internal terkait SPBE, membentuk Tim Koordinasi SPBE, mempersiapkan berbagai tata Kelola SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, membentuk forum kolaborasi SPBE, melaksanakan berbagai manajemen SPBE, melakukan Audit Internal TIK (Audit Internal Aplikasi dan Audit Internal Infrastruktur SPBE), serta meningkatkan fungsi dari berbagai layanan internal pemerintahan dan layanan publik sehingga minimal memiliki fungsi transaksional dan terintegrasi dengan berbagai sistem/ layanan yang saling berkaitan serta dikembangkan secara berkala.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022	3	2,79	93	Sangat Tinggi

Dari hasil penilaian Kementerian PANRB tersebut memberikan catatan penting bahwa dengan diterapkannya instrumen baru penilaian ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut mulai dari peningkatan terhadap :

a. Kebijakan Internal SPBE

Perlu untuk melakukan pembentukan kebijakan yang mengatur tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi.

b. Perencanaan Strategis SPBE

Perlu untuk menyiapkan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018, inovasi proses bisnis, memperbaiki peta rencana sehingga memenuhi kriteria yang ada

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perlu dilakukannya perbaikan dalam tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi, melakukan pembangunan pusat data, dan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

d. Penyelenggara SPBE

Perlu dibentuknya Tim Koordinasi SPBE yang sesuai dengan tugas fungsinya dan Kolaborasi penerapan SPBE

e. Penerapan Manajemen SPBE

Perlu dilakukannya manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.



f. Audit TIK

Perlu dilakukannya Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perlu dilakukannya peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang semula hanya bersifat interaktif menjadi bersifat transaksional atau lebih tinggi.

h. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Perlu dilakukan peningkatan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik semua layanan yang masih berada pada tingkat kematangan Level 2 (bersifat interaktif): Layanan Pengaduan Layanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

Sehingga untuk mencapai target Indikator Kinerja Pemerintah Kota Jambi berupa nilai indeks SPBE 3.0, maka perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PANRB tersebut. Perbaikan yang dilakukan berupa:

Untuk memperbaiki implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan mencapai nilai indeks SPBE 3.0, maka dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dan tingkat urgensi dari setiap indikator yang saling mempengaruhi, Perbaikan yang dilakukan berupa :

Tabel 3.6

Tindakanlanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB

NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
1	Melakukan reviu dan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan SPBE	Dilaksanakan	Reviu dan evaluasi peraturan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan SPBE dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Menyusun Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan SPBE	Diterbitkan tanggal 14 Juni 2022	Berisikan peraturan yang mengatur tentang kebijakan arsitektur SPBE, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, manajemen keamanan informasi, audit TIK, dan tim koordinasi, serta kebijakan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Jambi



NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
3	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 174 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	Diterbitkan tanggal 22 April 2022	Berisikan tentang tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi SPBE beserta struktur Tim Koordinasi SPBE
4	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 175 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE	Diterbitkan tanggal 22 April 2022	Berisikan tentang tugas dan fungsi dari Tim Pengarah SPBE beserta struktur Tim Pengarah SPBE
5	Menyusun Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Sekretariat SPBE	Diterbitkan tanggal 31 Mei 2022	Berisikan tentang tugas dan fungsi dari Sekretariat SPBE beserta struktur Sekretariat SPBE
6	Menetapkan arsitektur SPBE yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jambi Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Penetapan Arsitektur SPBE Kota Jambi Tahun 2022-2025	Diterbitkan tanggal 17 Juni 2022	Berisikan arsitektur SPBE Pemerintah Kota Jambi dan juga peta rencana SPBE
7	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 277 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pedoman Manajemen Resiko SPBE	Diterbitkan tanggal 30 Juni 2022	Berisikan pedoman tentang Manajemen Resiko SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Jambi
8	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 180 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko SPBE	Diterbitkan tanggal 22 April 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Tim Manajemen Resiko SPBE
9	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 276 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	Diterbitkan tanggal 30 Juni 2022	Berisikan pedoman tentang pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE
10	Menyusun Keputusan Walikota Jambi Nomor 268 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Audit Internal TIK SPBE	Diterbitkan tanggal 30 Juni 2022	Berisikan tugas dan fungsi dari Tim Audit Internal TIK SPBE
11	Mempersiapkan Proses Bisnis Pemerintah Kota Jambi dan Proses Bisnis OPD sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018	Dalam proses	Proses bisnis ini diperlukan untuk melakukan inovasi proses bisnis SPBE



NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
12	Mempersiapkan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi	Selesai, Versi 1	Akan dilakukan perbaikan terhadap pedoman tersebut
13	Melakukan rapat untuk penerapan SPBE Pemerintah Kota Jambi	Dilaksanakan	Melakukan rapat koordinasi SPBE Melakukan rapat untuk penyusunan Kebijakan – kebijakan terkait SPBE
14	Melakukan kolaborasi penerapan SPBE	Dilaksanakan	Melakukan kolaborasi untuk melakukan pembahasan dan percepatan penerapan SPBE
15	Melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet Pemerintah Kota Jambi	Dilaksanakan	Jaringan intranet Pemerintah Kota Jambi berjalan diatas jaringan Fiber Optic
16	Meningkatkan bandwidth Jaringan Internet Pemerintah Kota Jambi	Dilaksanakan	Kapasitas bandwidth jaringan internet Pemerintah Kota Jambi lebih kurang 1200 Mbps
17	Menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah milik Kementerian Kominfo	Digunakan	Telah melakukan ujicoba penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah milik Kementerian Kominfo
18	Melakukan audit internal TIK	Dilaksanakan	Audit Internal TIK yang dilaksanakan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Audit internal Aplikasi- Audit Internal Infrastruktur
19	Menyiapkan dokumen SKPL dan manual book dari layanan / aplikasi SPBE yang ada pada penilaian indikator SPBE	Selesai, versi 1	Akan terus dilakukan perbaikan terhadap SKPL dan manual book sesuai dengan perkembangan / perubahan layanan / aplikasi tersebut
20	Menyiapkan layanan / aplikasi pengelolaan barang milik daerah	Tahap pengembangan, versi 1	Layanan / aplikasi pengelolaan barang milik daerah ini masih dalam tahap ujicoba dan akan terus dikembangkan hingga dapat digunakan dilingkungan Pemerintah Kota Jambi
21	Membangun layanan / aplikasi pengawasan internal pemerintahan	Dalam proses	Masih dilakukannya pembahasan bersama dengan Inspektorat mengenai pembangunan layanan / aplikasi pengawasan internal pemerintahan tersebut



NO	IMPLEMENTASI	STATUS	KETERANGAN
22	Melakukan pengembangan pada aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik (SIKESAL)	Dalam Proses	Sedang dalam proses melakukan integrasi aplikasi SIKESAL dengan SP4N-Lapor!
23	Melakukan pengembangan layanan Data Terbuka Pemerintah Kota Jambi	Selesai, Versi 2	Telah dilakukannya pembaharuan layanan Data Terbuka dan juga dilakukannya integrasi dengan Data Dasar milik BPS (melalui API) serta Layanan Data Terbuka milik Pemerintah Kota Jambi juga telah menyediakan API untuk melakukan integrasi kedalam aplikasi lainnya
24	Melakukan pengembangan layanan JDIH Pemerintah Kota Jambi	Selesai, Versi 2	Telah dilakukannya pengembangan layanan JDIH sehingga bersifat transaksional dan juga terintegrasi dengan JDIHN.
25	Melakukan pengembangan aplikasi SIPADUKO Disdukcapil	Selesai, Versi 2	SIPADUKO merupakan layanan berbasis website yang dapat digunakan masyarakat Kota Jambi untuk melakukan kepengurusan data kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kota Jambi, sehingga dapat mempercepat proses kepengurusan data tersebut. Layanan SIPADUKO ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
26	Melakukan pemindahan website SIMPAREDA milik BPPRD	Selesai	Saat ini SIMPAREDA dapat diakses melalui domain asli milik Pemerintah Kota Jambi yaitu https://simpareda.jambikota.go.id/
27	Buku Statistik Sektoral 2022	Selesai	Buku statistik sektoral adalah kumpulan data statistik sektoral pada tahun sebelumnya yg disusun kedalam bentuk infografis. Sumber data sektor berasal dari seluruh Produsen data di Pemerintah kota jambi
28	Melakukan revisi Peta Rencana SPBE Kota Jambi 2022-2024	Selesai, dalam bentuk buku	Target 2023 akan dilakukan penetapan Peta Rencana tersebut menggunakan Keputusan Walikota Jambi

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Kepegawaian Daerah
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
8. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
9. Program Informasi dan Komunikasi Publik
10. Program Aplikasi Informatika
11. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Pelayanan Penanaman Modal
14. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
15. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2. Nilai SAKIP

Secara konsepsi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Landasan hukum implementasi SAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP menggunakan acuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Penguatan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu asas penataan dalam kerangka implementasi reformasi birokrasi. Dalam rangka mengukur tingkat implementasi SAKIP, maka perlu dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari bahan masukan sebagai umpan balik untuk penetapan kebijakan.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; dan 4) Evaluasi Kinerja.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Nilai SAKIP

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.	Nilai SAKIP	Surat Kemen PANRB Nomor B/914/AA.05/2022 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	100	Sangat Tinggi

Terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan implementasi SAKIP. Evaluasi atas Implementasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif unit organisasi dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Tahun 2022 Pemerintah Kota Jambi kembali memperoleh penghargaan dengan kategori penilaian tingkat akuntabilitas kinerja Baik (B) dengan nilai 67,37 berdasarkan Surat Kemen PANRB Nomor B/914/AA.05/2022 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Rincian Hasil Evaluasi Nilai SAKIP

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,84
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,28
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,20
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,37
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level penda maupun level organisasi perangkat daerah.

Interprestasi dari nilai B (Baik) ini menggambarkan bahwa baru 1/3 unit kerja memiliki AKIP yang sudah baik, khususnya pada unit kerja utama. Dengan demikian, masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setiap komponen penilaian memiliki Sub Komponen dengan beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan Sub Komponen tersebut. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgement" dari evaluator dan terkait kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP.

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, Bappeda Kota Jambi terus berupaya untuk mencapai atau melebihi target. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Anggaran dengan mempedomani target-target Kinerja Daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.
2. Melakukan pendampingan dalam penetapan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan Perangkat Daerah yang SMART-TC, yaitu :
 - Spesific : menekankan pentingnya menetapkan target yang spesifik.

Suatu tujuan (target) yang spesifik biasanya akan menjawab pertanyaan “5W”:

- What : Apa yang ingin dicapai?
 - Why : Mengapa harus dicapai?
 - Who : Siapa yang terlibat?
 - Where: Dimana target akan dicapai?
 - Which: Identifikasi persyaratan untuk mencapai target dan kendala yang menghalangi tercapainya target.
- Measurable : menekankan pentingnya kriteria indikator yang digunakan dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Target yang terukur akan mampu menjawab salah satu pertanyaan:
- Berapa banyak?
 - Bagaimana anda mengetahui bahwa target tersebut telah tercapai?
- Attainable : menekankan bahwa indikator dan target harus realistis dan dapat dicapai dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat. Target yang attainable akan mampu menjawab pertanyaan: Bagaimana target tersebut akan dicapai
- Relevan : menekankan bahwa indikator menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan kinerja atau hasil yang diukur, dan dapat mendukung atau selaras dengan target-target lainnya.
- Time bound : menekankan pentingnya menetapkan target dengan kerangka waktu, yaitu memberikan deadline pencapaian target. Komitmen kepada deadline akan membantu Perangkat Daerah untuk tetap fokus menjalankan pekerjaan untuk memenuhi target tepat waktu, atau bahkan lebih cepat.
- Trackable : menekankan pentingnya indikator dan target dapat dipantau dan dikumpulkan sumber datanya.
- Continuously Improved : menekankan pentingnya menepatkan kualitas dan target berkembang dan selalu disempurnakan, maka kalimat indikator harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil program.
3. Melakukan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program Perangkat Daerah dan capaian indikator kinerja perangkat daerah.

Indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

3. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Atas Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023 bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan IPP, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pemenuhan 6 aspek pelayanan publik sebagaimana yang diamanahkan dalam PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun hasil yang dicapai dari target 3,99 dengan capaian realisasi 4,205 (-A), dengan Rincian nilai DPMPTSP mendapatkan Indeks 4,19 (-A) DAN DISDUKCAPIL mendapatkan Indeks 3,74 (B) Pemerintah Kota Jambi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
3.	Indeks Pelayanan Publik	Surat Keputusan MENPAN RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022	3,99 (B)	4,205 (-A)	105,38	Sangat Tinggi

Nilai Indeks Pelayanan Publik dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan memenuhi 6 (enam) aspek yaitu :

- Aspek Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- Aspek Professionalisme SDM (Tersedia waktu pelayanan, SK kode etik, dan kode perilaku pelaksana, mekanisme yang dibangun untuk meningkatkan motivasi kerja, SK yang mengatur tentang pemberian penghargaan, penerapan budaya pelayanan 5S)



- Aspek Sarana dan Prasarana (Tersedia sarpras berupa tempat parkir, kelayakan ruang tunggu pelayanan, sarana toilet pengguna layanan, sarpras bagi kelompok rentan, sarpras penunjang seperti : ruang laktasi, jalur evakuasi, ruang ibadah, cctv dsb., sarpras bagi FO bagian Informasi di unit layanan).
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (Sudah tersedia system informasi elektronik dan non-elektronik).
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan (Tersedia sarpras konsultasi pengaduan berupa: kotak saran, ruang khusus dan petugas khusus, publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan elektronik dan non-elektronik).
- Aspek Inovasi Pelayanan Publik (Sudah menjalankan Inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengoptimalan pelayanan).

Selain itu Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain:

1. Membangun Mal Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas SDM;
3. Pengembangan Aplikasi SILANCAR (Sistem Informasi Layanan Perizinan Aman Cepat Dari Rumah);
4. Mengoptimalisasi pelayanan publik menuju pelayanan prima.

Indikator Indeks Pelayanan Publik untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Penataan Bangunan Gedung;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Program Pencatatan Sipil;
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sasaran Strategis 2 Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah

4. Persentase PERDA dan PERVAL yang ditegakkan

Pemerintah Kota Jambi telah menyusun regulasi dan kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perwal dalam upaya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Iklim yang kondusif dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Satpol PP secara profesional, humanis dan tegas tanpa tebang pilih dengan pengawasan pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah konkret yaitu penegakan Perda dan Perwal tersebut. Total dari kasus pelanggaran Perda tahun 2022 sebanyak 146 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 328 kasus (55,48 persen). Persentase target dan realisasi penegakan Perda dan Perwal pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Persentase Perda dan Perwal yang ditegakkan

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
4.	Persentase Perda dan Perwal yang ditegakkan	$\% \text{ Perda \& Perwal yang ditegakkan} = \frac{\text{Jumlah Perda dan Perwal yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda dan Perwal yang memuat sanksi}} \times 100\%$	84	91,30	108,69	Sangat tinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 tercapai dengan capaian kinerja lebih dari 100% yaitu 108,69%.Adapun factor-faktor pendukung pelampauan target diatas antara lain karena :

1. Terbentuknya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat mandiri maupun diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga lainnya
3. Terbentuknya tim terpadu penertiban dan penegakan produk hukum daerah berdasarkan SK Wali Kota Nomor 338 Tahun 2022
4. Menyediakan sarana pengaduan melalui media sosial (IG, WA, Twitter, FB, Website) dan ruangan pelayanan trantibum dan linmas



5. Terbentuknya bantuan kendali operasi (BKO) Satpol PP di tiap kecamatan yang intensif melakukan penertiban dan penegakan produk hukum daerah bersama pihak kecamatan dan kelurahan.

Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam upaya pencapaian target seperti:

1. Jumlah personil Pol PP dan PPNS jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah Kota Jambi
2. Sarana prasarana operasional kegiatan yang belum optimal
3. Belum optimalnya sosialisasi produk hukum daerah oleh PD Pemrakarsa.

Indikator Persentase Perda dan Perwal yang ditegakkan untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh Program antara lain:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
5. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan

5. Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan

Dalam rangka menunjang dan memfasilitasi kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti distribusi barang dan jasa, Pemerintah Kota Jambi berupaya meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perkotaan. Cakupan Layanan Infrastruktur berperan penting dalam tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Cakupan layanan infrastruktur perkotaan yaitu infrastruktur jalan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, persampahan, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang. Cara perhitungan cakupan layanan infrastruktur perkotaan dengan menggunakan pehitungan didapatkan dari perhitungan data-data terkait Indeks infrastruktur jalan mantap, indeks infrastruktur gedung dan indeks sarana dan prasarana dasar permukiman.

Capaian cakupan layanan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Cakupan Layanan Insfrastruktur Perkotaan

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	Persentase Bobot Program (15% Persentase Rasio jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap + 15% Persentase rasio cakupan pengelolaan air minum + 15% Persentase Rasio cakupan pengelolaan da dan pengembangan sistem air limbah + 10% persentase rasio sistem jaringan drainase dalam kondisi baik + 10% persentase rasio jalan lingkungan dalam kondisi baik + 10% Persentase rasio bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + 5% Persentase rasio bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik + 5% persentase rasio cakupan sarana dan prasarana persampahan + 5% persentase peningkatan kualitas jasa kontruksi ke PU an + 10% Persentase Rasio ketaatan terhadap tata ruang)	63,31%	63,77%	100,73%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 tercapai dengan capaian kinerja yaitu 100,73%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja. dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan. diharapkan dapat menghasilkan output yang jelas sesuai targetnya.
4. Setiap bulan dilaksanakan rapat evaluasi rutin pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya. untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Rapat koordinasi ini juga mengundang instansi lain. pihak ketiga dan stakeholder lainnya yang ada kaitannya dengan program dan kegiatan bidang urusan pekerjaan umum.
5. Selalu berkoordinasi dengan Kementrian PUPR pusat maupun provinsi terkait ketentuan/regulasi/aturan perundang undangan yang berlaku saat ini.

Sementara faktor eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksud antara lain :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PD DPUPR di Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Provinsi.
2. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terarah dan terukur.
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBD Pemerintah Daerah Kota Jambi dan sumber dana lainnya.
4. Adanya kerja sama antara OPD dengan instansi lain.
5. Adanya Aparat pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Sedangkan solusi yang dilakukan adalah koordinasi rutin internal dengan memperhatikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kualitas perencanaan, pencermatan anggaran kas, pengawasan pekerjaan secara intensif, monitoring dan pelaporan capaian kinerja fisik dan keuangan berkala dan evaluasi rutin.

Faktor-faktor pendukung lainnya untuk mencapai target indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan meliputi:

1. Meningkatnya Indeks infrastruktur jalan mantap
Meningkatnya infrastruktur jalan mantap didukung oleh rasio jalan status kota dalam kondisi mantap
2. Meningkatnya indeks infrastruktur Gedung
Meningkatnya indeks infrastruktur gedung didukung oleh :
 - Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik
 - Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik
 - Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an
3. Meningkatnya indeks sarana dan prasarana dasar permukiman.
Meningkatnya indeks sarana dan prasarana dasar permukiman didukung oleh:
 - Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum
 - Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik
 - Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik
 - Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan
 - Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Program Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air Kota Jambi terhadap 8 anak sungai dan 3 danau dengan frekuensi pengam bilang sampel sebanyak 3 kali pada tahun 2022, didapatkan hasil sebesar 42,5 dari target 39,9. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 43,99 maka Indeks Kualitas Air Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 1,49 dalam kategori cemar sedang. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengembangan perumahan di daerah *hinterland* dan semakin meningkatnya limbah domestik rumah tangga yang masuk ke anak sungai dan danau, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
6.	Indeks Kualitas Air	39,9	42,5	106,52	Sangat Tinggi

Capaian kinerja indikator “Indeks Kualitas Air” adalah sebesar 42,50 dari target sebesar 39,9 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,52%, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan. Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dari pengujian kualitas air anak sungai dan danau di Kota Jambi dengan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

Perhitungan indeks Pencemaran untuk indikator kualitas air dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index-PI). Menurut definisinya PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air I dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan indeks pencemaran adalah:



$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Dimana :

- Lij : Konsentrasi Baku peruntukkan air (j)
 Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
 Plj : Pencemaran Bagi Peruntukkan (j) (Ci/Lij)M
 : Nilai Maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R
 : Nilai rata-rata dari Ci/Lij

Dimana P adalah konstanta yang biasanya bernilai =5

Evaluasi terhadap nilai PI adalah:

- 0,0 ≤ Plj ≤ 1,0 : Memenuhi Baku mutu (kondisi baik)
 1,0 < Plj ≤ 5,0 : Cemar ringan
 5,0 < Plj ≤ 10 : Cemar sedang
 Plj > 10 : Cemar Berat

Untuk menghitung indeks pencemaran air maka dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- Langkah 1 : Masing-masing titik pemantauan diasumsikan memiliki 1 (satu) data dan memiliki status mutu air.
- Langkah 2 : Kemudian konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij)baru yaitu dengan rumus sebagai berikut : (Ci/Lij) baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)
- Langkah 3 : Merangkum langkah No. 1 dan No.2 kemudian membuat tabel indeks pencemaran air, masukkan data analisis uji laboratorium setiap sungai dalam rumus software Microsoft excel untuk mendapatkan nilai indeks kualitas air sungai. Hasil analisis dan kualitas air sungai di kota Jambi disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.13
Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi Metode IP

No	Titik Pantau	IP	Status
1	Anak Sungai Kenali Besar (Hulu)	9,5	Sedang
2	Anak Sungai Kenali Besar (Hilir)	10,3	Berat
3	Anak Sungai Kenali Besar (Tengah)	9,5	Sedang
4	Anak Sungai Kenali Kecil (Hulu)	1,9	Ringan
5	Anak Sungai Kenali Kecil (Hilir)	8,1	Sedang
6	Anak Sungai Kenali Kecil (Tengah)	6,6	Sedang
7	Anak Sungai Asam (Hulu)	2,8	Ringan
8	Anak Sungai Asam (Hilir)	5,9	Sedang
9	Anak Sungai Asam (Tengah)	6,6	Sedang
10	Anak Sungai Tambuku (Hulu)	10,4	Berat
11	Anak Sungai Tambuku (Hilir)	8,4	Sedang



No	Titik Pantau	IP	Status
12	Anak Sungai Tambuku(Tengah)	8,7	Sedang
13	Anak Sungai Selincah (Hulu)	7,1	Sedang
14	Anak Sungai Selincah (Hilir)	4,4	Ringan
15	Anak Sungai Selincah (Tengah)	4,5	Ringan
16	Anak Sungai Kambang (Hulu 1)	4,4	Ringan
17	Anak Sungai Kambang (Hulu II)	5,7	Sedang
18	Anak Sungai Kambang (Hilir)	6,6	Sedang
19	Anak Sungai Kambang (Tengah)	5,9	Sedang
20	Anak Sungai Putri (Hulu Bag,1)	5,2	Sedang
21	Anak Sungai Putri (Hulu Bag,II)	1,3	Ringan
22	Anak Sungai Putri (Hulu) Bag. III	1,3	Ringan
23	Anak Sungai Putri (Hilir)	3,2	Ringan
24	Anak Sungai Putri (Tengah)	5,5	Sedang
25	Anak Sungai Solok Sipin (Hulu)	4,0	Ringan
26	Anak Sungai Solok Sipin (Hilir)	5,2	Sedang
27	Anak Sungai Solok Sipin (Tengah)	8,1	Sedang

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel 3.13 di atas terlihat bahwa nilai indeks pencemaran (IP) berkisar antara 1,3 – 4,5 nilai indeks pencemaran air (IP) terendah terdapat dilokasi Anak Sungai Putri pada bagian hulu 2 dan 3 yaitu dengan nilai sebesar 1,3 **Kategori Tercemar Ringan** dan nilai terbesar indeks pencemaran air (IP) terdapat di Sungai Kenali Besar Hilir sebesar 10,3 dan Sungai Tambuku Hulu yaitu sebesar 10,4 **Kategori Tercemar Berat**, sedangkan **Nilai Indeks Kualitas Air Sungai 36,67**.

Pencemaran air sungai di Kota Jambi, didominasi oleh tingginya kadar BOD₅, COD, DO, PO₄, Cu, dan Zn. Kandungan Cu²⁺ dan Zn merupakan logam berat yang biasanya terdapat di sedimen sungai, adanya kandungan Cu²⁺ dan Zn yang tinggi di badan air kemungkinan berasal dari aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang hulu dan hilir sungai. Salah satu contoh dari aktivitas masyarakat tersebut yaitu kegiatan penumpukan barang bekas atau dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan robet (rombongan besi tua) dimana diantara barang-barang bekas tersebut terdapat limbah B3 seperti batu baterai dan besi, dimana kedua barang tersebut bersifat korosif. Barang-barang bekas tersebut diletakkan di tempat terbuka (tanpa atap/penutup) sehingga pada siang hari di cuaca panas suhu menjadi naik, Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu.

Sedangkan pada saat cuaca hujan barang-barang bekas tersebut terkena air hujan dan menjadi basah, Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, proses percepatan korosi juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi.

Selain aktivitas masyarakat kegiatan usaha juga memiliki peran dalam adanya kandungan Cu^{2+} dan Zn, kegiatan usaha yang dimaksud adalah cucian mobil, motor dan bengkel yang letaknya di sepanjang aliran sungai dari hulu sampai hilir. Ceceran oli, larutan oli pada air cucian mobil dan motor pada saat proses pencucian. Rata-rata usaha cucian mobil dan motor 80% tidak memiliki IPAL air buangan sisa pencucian dialirkan langsung menuju drainase kota. Hal inilah menjadi salah satu penyebab tingginya kandungan Cu^{2+} dan Zn di delapan sungai Kota Jambi.

Sementara untuk tingginya kadar BOD5 dan COD jelas karena tingginya bahan organik yang masuk ke badan air, hal ini bisa disebabkan oleh limbah cair domestik. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD5 memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit terurai di perairan. Tingginya kadar BOD5 dan COD akan menurunkan tingkat DO, hal ini juga menjadi salah satu parameter yang hampir selalu diluar baku mutu. Kondisi ini menunjukkan bahwa semua sungai yang melewati Kota Jambi sudah perlu untuk dikelola dengan baik sehingga kedepan kondisi seperti ini dapat diperbaiki kearah yang lebih baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga melakukan perhitungan Indeks Pencemaran Air Danau dengan hasil disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi Metode IP

NO	Titik Pantau	Rata-Rata	Status	IKA
1	Danau Sipin (Komersil)	2,9	ringan	
2	Danau Sipin (Non Komersil)	3,1	ringan	
3	Danau Sipin (Muara)	2,6	ringan	
4	Danau Teluk (Komersil)	2,1	ringan	
5	Danau Teluk (Non Komersil)	1,5	ringan	
6	Danau Teluk (Muara)	1,6	ringan	
7	Danau Teluk Kenali	3,4	ringan	
8	Danau Teluk Kenali (Non	2,8	ringan	
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	3,0	ringan	
	Total rata-rata	2,5	ringan	

Sumber : hasil analisis 2022

Berdasarkan tabel 3.7 di atas terlihat bahwa nilai indeks pencemaran (IP) berkisar 1,5 - 3,4 nilai indeks pencemaran air (IP) terendah terdapat di lokasi Danau Teluk (Non Komersil) yaitu sebesar 1,5 Kategori Tercemar Ringan dan nilai terbesar indeks pencemaran air (IP) terdapat di Danau Teluk Kenali (komersil) sebesar 3,4 Kategori Tercemar ringan, sedangkan untuk rata-rata **Nilai Indeks Kualitas Air Danau 48,33**.

Pencemaran air danau di kota Jambi lebih di dominasi tingginya kadar BOD5, COD, sebagian di beberapa titik pengambilan sampel terdapat parameter PO_4 , Nitrit, Cu, dan Zn. Faktor-faktor yang mempengaruhi BOD yaitu meningkatnya jumlah senyawa organik yang diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob, dan tersedianya

jumlah oksigen yang dibutuhkan. Tingginya nilai BOD dapat disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organik pada danau. Bahan organik dan logam berat yang masuk ke badan air, hal ini bisa disebabkan oleh limbah cair domestik dan aktivitas kegiatan masyarakat lainnya yang sebagian terbawa dari anak-anak sungai yang mengalir menuju danau disamping itu dimungkinkan berasal dari endapan pakan ikan maupun jasad biota yang telah mati.

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai dan Indeks Kualitas Air Danau maka didapatkan Indeks Kualitas Air Kota Jambi sebesar **42,50**. (perhitungan nilai indeks kualitas air dapat dilihat pada lampiran 2). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bobot indeks kualitas air diberikan batasan sebagai berikut :

- a. 70 (tujuh puluh) untuk memenuhi baku mutu;
- b. 50 (lima puluh) untuk tercemar ringan;
- c. 30 (tiga puluh) untuk tercemar sedang; dan
- d. 10 (sepuluh) untuk tercemar berat.

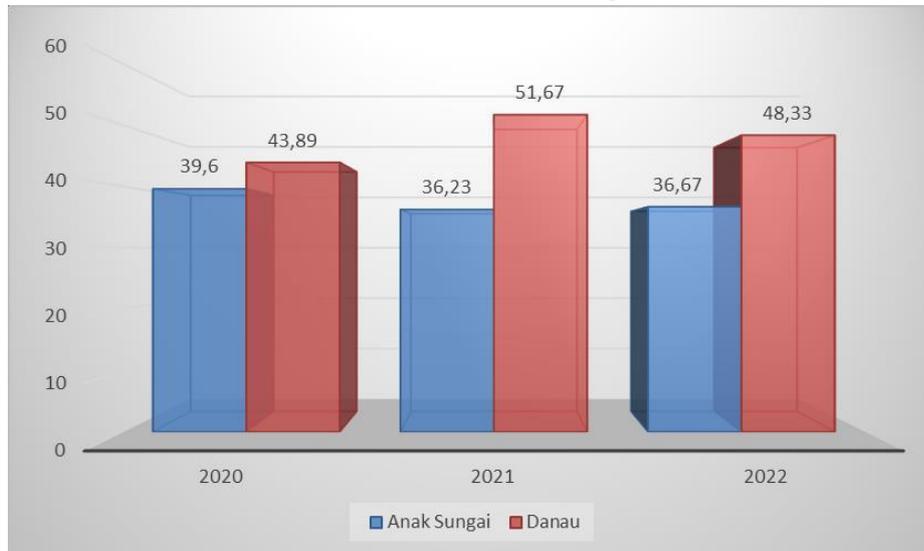
Kategori Indeks Kualitas Air :

1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$
2. Baik $70 \leq x < 90$
3. Sedang $50 \leq x < 70$
4. Kurang $25 \leq x < 50$
5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$

Indeks Kualitas Air Kota Jambi termasuk kategori kurang.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Kota Jambi terhadap 8 anak sungai dan 3 danau dengan frekuensi pengambilan sampel sebanyak 3 kali pada tahun 2022, didapatkan hasil sebesar 42,50 dari target 39,9 sudah terlampaui. Dimana angka 42,50 berasal dari rata-rata Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 36,67 di tambah Indeks Kualitas Air Danau sebesar 48,33. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 43,99 maka Indeks Kualitas Air Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 1,49. Penurunan tersebut dikarenakan ada penurunan kualitas air Danau yang semula 51,67 pada tahun 2021 menurun menjadi 48,33 pada tahun 2022. Penurunan kualitas air Danau tersebut terjadi di Danau Teluk Kenali yang mana kondisi Danau Teluk Kenali sudah mengalami over target dari volume keramba ikan yang di kelola petani, sehingga indeks pencemar yang semula masuk dalam kategori cemar ringan menjadi cemar sedang. Disamping itu penyebab lainnya di pinggir Jalan danau Teluk Kenali sudah ada beberapa bangunan permanen seperti Masjid, Rumah makan dan rumah penduduk yang membuang langsung limbahnya ke Danau Teluk Kenali. Berikut ini kami sajikan data tren kecenderungan indeks kualitas air Danau dari tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Jambi, dapat dilihat pada gambar Grafik berikut :

Gambar 3.1
Grafik Indeks Kualitas Air Sungai dan Danau



Tahun 2022 adalah tahun ke 4 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Air" tahun ini adalah sebesar 106,52%, bila dibandingkan realisasi pada tahun 2021 dengan nilai 43,99 menjadi 42,50 di tahun 2022 maka terjadi penurunan indeks kualitas air sebesar 1,49 dan apabila capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kerjanya mencapai 106,11%.

Untuk meningkatkan kualitas air di kota jambi, pemerintah kota jambi sedang giat-giatnya menjadikan danau sipin sebagai tempat eco-wisata sehingga banyak dilakukan normalisasi dan pembersihan terhadap sampah maupun enceng gondok/gulma yang tumbuh di danau sipin, dan ini berdampak positif terhadap penambahan oksigen dalam air danau selanjutnya secara tidak langsung dapat mengurangi menurunkan beban pencemaran air danau. Berdasarkan data inventarisasi diketahui bahwa limbah domestik mendominasi sebagai sumber beban pencemaran. Limbah domestik berasal dari kegiatan dan aktifitas manusia dalam kawasan permukiman, limbah tersebut tidak dilakukan pengelolaan terlebih dahulu namun langsung dialirkan ke badan penerima. Limbah domestik yang terakumulasi dari beberapa tahun sebelumnya menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air anak sungai maupun air danau di Kota Jambi. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengurangi beban pencemaran air dengan melakukan pembangunan sarana prasarana fisik melalui kegiatan pembuatan septictank komunal ataupun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal dari kegiatan sanimas oleh Dinas PUPR Kota Jambi dan Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih) yang dilakukan bersama oleh Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat untuk membersihkan kali atau anak sungai yang ada di Kota Jambi.

Selain itu keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholders baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemar air sangat diperlukan, adapun yang telah dilakukan antara lain :

1. Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih).
2. Pembersihan danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin, dengan menyediakan perahu pembersi Danau Sipin sebanyak 2 Unit.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2022 telah dilakukan pembinaan sebanyak 66 dunia usaha dan pengawasan terhadap 102 perusahaan.
4. Penyebarluasan informasi (penyuluhan), kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat dimedia cetak dan elektronik
5. Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten tetangga
6. Pembangunan pengelolaan limbah terpusat skala Kota
7. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.
8. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
9. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air

Faktor Pendorong :

1. Adanya Laboratorium Lingkungan yang pengujian kualitas air telah terakreditasi sebanyak 17 parameter oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Jambi.
2. Saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan.

Faktor Penghambat :

1. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini sangat berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Jambi.
2. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di sungai.
3. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan

Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, dengan melakukan :
 - a. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran di Kota Jambi:
 - b. Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran.
 - c. Melakukan pengujian sampel sebanyak 645 sampel di 141 titik.
 - d. Melakukan kegiatan gotong royong di Danau Sipin.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan melakukan :
 - a. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
 - b. Melakukan pembinaan 66 usaha dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebanyak 102 pelaku usaha.
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
8. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

6. Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Jambi dilakukan pada lima titik kawasan dengan metode *passive sampler* dengan hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
7.	Indeks Kualita Udara	80,76	88,09	109,08	Sangat Tinggi

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2022 sebesar 80.76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109,08% capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dari kondisi awal tahun 2021 sebesar 85,02 dapat direalisasikan dengan nilai 88,09 pada tahun 2022, maka terjadi kenaikan nilai sebesar 3,07.

Pencapaian indeks kualitas udara tahun 2022 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 109,07%, hal ini disebabkan pada tahun 2022 bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga tidak terjadi dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Pemantauan kualitas udara berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas udara saat ini, Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu kualitas udara. Data hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup di daerah. Polusi udara ditimbulkan dari berbagai faktor sebagai akibat terjadinya pencemaran udara seperti polusi kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran hutan dan lahan. Alat pemantauan kualitas udara otomatis atau yang disebut *Air Quality Monitoring System (AQMS)* dan alat *Passive Sampler* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan pemantauan kualitas udara Ambien yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Titik peruntukan pengambilan sampel kualitas udara otomatis atau yang disebut *Air Quality Monitoring System (AQMS)* stationnya yang berlokasi di lapangan depan kantor Walikota Jambi sementara untuk *pasive sampler* yang berlokasi di 4 (empat) titik sebagai peruntukan sumber pencemaran udara yaitu Peruntukan wilayah pemukiman, Perkantoran, Transportasi dan area Industri. Sebaran lokasi pengambilan sampel udara Ambien disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.16
Lokasi Titik Sampel Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi

No	Nama Peruntukan	Alamat	Titik Koordinat
1	Station AQMS	Lapangan Depan Kantor Walikota	X: -1.629584 Y: 103.607389
2	Transportasi	Jl. DI.panjaitan, Kel.Jelutung	X: -1.615830 Y: 103.616419
3	Industri	Kawasan Industri crumb rubber, Kel.Sijenjang	X: -1.574666 Y: 103.628226
4	Pemukiman	Pemukiman (perum.Villa Kenali, Kel.Mayang Mangurai)	X: -1.645444 Y: 103.585694
5	Perkantoran	Komplek perkantoran Walikota jambi	X: -1.629584 Y: 103.607389

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2022

Data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Baku Mutu Udara Ambien yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kemudian data hasil pemantauan kualitas udara dianalisa menggunakan metode analisa perhitungan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Dalam peraturan tersebut terdapat penetapan parameter-parameter dasar untuk indeks standar pencemar udara (ISPU), yaitu NO₂, SO₂, Karbon Monoksida (CO), Ozon (O₃), dan PM₁₀. Selanjutnya Kadar SO₂ dan kadar NO₂ sebagai indikator perhitungan nilai IKU tingkat Nasional.

Dari hasil uji laboratorium di 4 (empat) titik sebagai peruntukan sumber pencemaran udara yaitu Peruntukan untuk wilayah pemukiman, Perkantoran, Transportasi dan area Industri yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2020 yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat di lihat pada Tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.17
Hasil Pemantauan Pasive Sampler

NO	PERUNTUKAN	Kadar NO ₂ (BM EU 40)	Kadar SO ₂ (BM EU 20)	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂
		µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1	Transportasi	20.58	4.97	25.38	5.06
2	Industri	9	6.86	13.01	6.38
3	Pemukiman	11.66	5.38	12.17	3.05
4	Perkantoran	12.01	4.27	12.55	6.40
5	BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57

Sumber : Hasil Uji Laboratorium KLHK, 2022

Berdasarkan Tabel 3.17 Hasil Pemantauan kualitas udara dengan metode Pasive Sampler Kota Jambi Tahun 2022 tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk parameter NO₂ maupun Parameter SO₂ masih di bawah baku mutu jika di bandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) parameter yang di gunakan adalah Kadar SO₂ dan kadar NO₂ sebagai indikator perhitungan nilai IKU tingkat Nasional. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara dapat di lihat pada Tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.18
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Jambi Tahun 2022

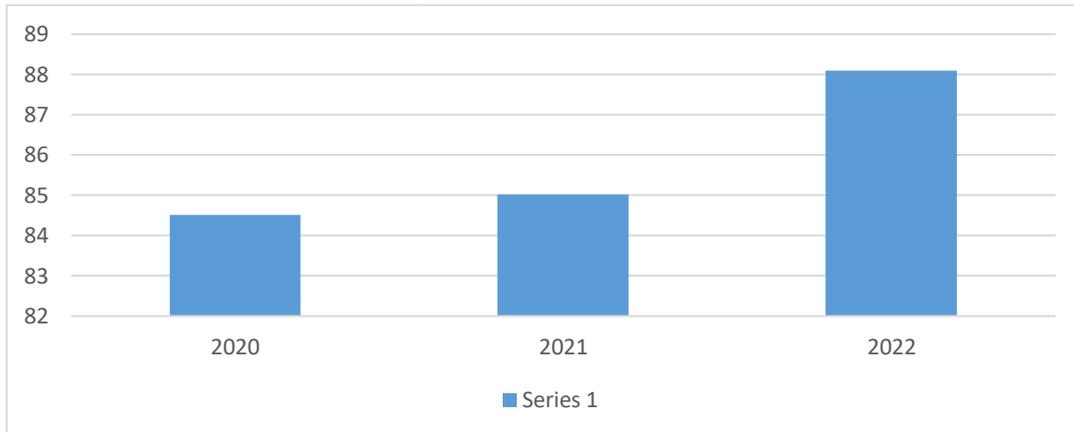
NO	Peruntukan	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	NO ₂ Rata- rata Peruntukan	SO ₂ Rata- rata Peruntukan	NO ₂ Rata- rata	SO ₂ Rata- rata	Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	Ieu	IKU Kota Jambi
		µg/m ³													
1	Transportasi	20,58	4,97	25,38	5,06			22,98	5,02	14,56	5,30	0,36	0,26	0,31	88,09
2	Industri	9,08	6,86	13,01	6,38			11,05	6,62						
3	Pemukiman	11,66	5,38	12,17	3,05			11,92	4,22						
4	Perkantoran	12,01	4,27	12,55	6,4			12,28	5,34						
5	BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57										

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan Tabel 3.21 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Jambi Tahun 2022 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai IKU Kota jambi Tahun 2022 sebesar 88,09 dengan **Katagori Baik** dan hal ini menunjukkan masih di atas target Nasional dalam RPJMN 2022 yaitu sebesar 80,76.

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas udara dalam suatu rentang waktu dan waktu tertentu, untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*).

Gambar 3.2
Evaluasi Kecenderungan Indeks Kualitas Udara di Kota Jambi



Evaluasi kecenderungan dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kualitas udara dengan rentang waktu tertentu, untuk kegiatan indeks kualitas udara di Kota Jambi rentang waktu ditentukan yaitu selama tiga tahun, terhitung dari tahun 2019 hingga 2022. Dari gambar 3.3 Grafik Evaluasi Kecenderungan Indeks Kualitas Udara Di Kota Jambi di atas menunjukkan dalam rentang waktu tiga tahun nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) cenderung naik yang mana Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2020 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,51 dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu sebesar 85,02, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 88,09, hal ini di karenakan Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen dalam pengendalian pencemaran udara dengan melaksanakan kegiatan kegiatan langit biru dan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau sebagai penyerap Polutan yang efektif. Dari hasil Pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) selama periode bulan januari sampai dengan bulan Nopember Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik di bawah ini:

Tabel 3.19
Hasil Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2022

No.	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1	36	52	53	54	52	54	35	19	27	52	32	23
2	60	24	52	54	24	54	65	37	27	51	36	36
3	36	44	52	57	21	57	56	18	16	40	37	31
4	35	30	46	43	23	43	50	40	29	40	52	0
5	-	51	35	44	21	44	43	13	30	35	30	67
6	42	26	33	51	20	51	37	30	30	36	32	18
7	47	22	30	41	21	41	-	28	32	43	31	59
8	52	29	35	41	-	41	50	52	33	45	29	0
9	38	37	34	42	-	42	22	54	26	42	23	0
10	33	24	35	52	30	52	38	45	-	41	25	0
11	33	50	28	43	19	43	28	31	30	41	24	0
12	46	39	28	43	27	43	38	36	28	49	23	0



No.	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
13	37	30	32	50	27	50	29	34	33	39	23	0
14	39	20	34	42	41	42	30	24	34	35	23	0
15	40	19	30	68	35	68	24	18	32	40	26	0
16	50	44	30	68	38	42	29	17	41	40	23	0
17	37	34	33	42	33	40	23	26	30	38	24	0
18	36	44	29	44	35	44	28	20	31	37	25	0
19	31	55	43	55	39	55	34	24	48	37	33	0
20	30	56	-	45	28	45	27	17	32	36	24	0
21	30	52	30	27	25	27	26	26	53	44	27	0
22	32	38	41	27	33	29	24	12	59	34	25	0
23	40	37	63	29	34	36	21	19	50	32	27	0
24	36	55	42	36	53	26	17	19	50	50	37	0
25	45	55	34	25	30	25	25	24	51	39	23	0
26	20	-	58	28	71	28	11	29	47	34	31	0
27	51	57	52	28	66	43	26	24	51	36	23	0
28	54	57	60	36	40	41	26	22	47	35	23	0
29	39	0	51	34	53	27	50	29	45	33	25	0
30	49	0	51	51	49	45	12	9	50	37	24	0
31	37	0	44	0	48	0	26	26	0	45	0	0
Rata2	39,70	40,04	40,47	43,33	35,72	42,60	31,67	26,52	67,00	41,20	28,97	39

Sumber : Data Olahan, 2022

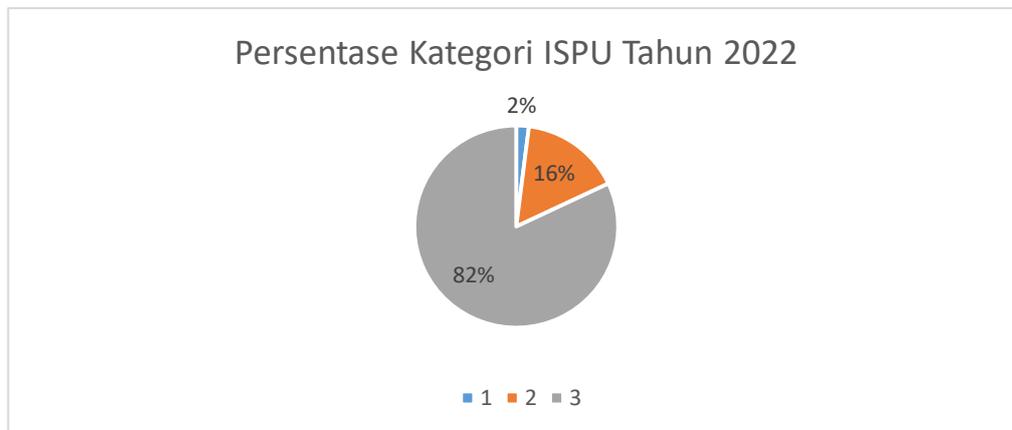
Keterangan : Jumlah rata-rata per tahun 39,63 (Kategori Baik)

Berdasarkan Kepmen LHK Nomor :P.14/MENLHK/7/2020

0	-	50	Baik
51	-	100	Sedang
101	-	199	Tidak Sehat
200	-	299	Sangat Tidak Sehat
300	-	keatas	Berbahaya

Berdasarkan Tabel 3.13 Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2022 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berfluktuasi nilai tertinggi terjadi pada bulan Maret Tahun 2022 yaitu sebesar 43,33 dengan kategori **sedang** selanjutnya, Jika di rata-ratakan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2022 sebesar 39,68 hal ini menunjukkan kategori **Baik** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Presentasi Kategori Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Gambar 3.3
Grafik Persentase Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Tahun 2022



Sumber : Hasil Analissi 2022

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa presentasi Katagori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi Tahun 2022 yang terbanyak adalah dengan Katagori Baik yaitu sebesar 82% sementara katagori sedang sebanyak 16% dan Tidak Ada Data sebesar 2%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kualitas Udara adalah :

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Air Quality Monitoring System (AQMS).
2. Kegiatan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor (spotcheck kendaraan bermotor) selama tiga hari berturut-turut pada ruas jalan yang berbeda dengan target total 1500 kendaraan. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor hari pertama Pada tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Hos Cokroaminoto (Halaman Parkir Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi) pada pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Acara secara simbolik dibuka oleh Wakil Walikota Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian emisi kendaraan dinas Wakil Walikota dan staf ahli walikota Jambi, Kepala DLH Kota Jambi serta mobil dinas lainnya kemudian diteruskan pengujian kendaraan umum

Gambar 3.4

Pengujian emisi kendaraan yang dilakukan oleh Wakil Walikota Jambi



Pengujian emisi kendaraan bermotor hari kedua tanggal 19 Oktober 2022 dilaksanakan di Jalan Sultan Taha (Depan WTC) dan pengujian uji emisi hari ketiga tanggal 20 Oktober 2022 di Jalan H. Agus Salim (halaman parkir Gedung Senam Kotabaru).

Gambar 3.5

Uji Emisi hari ke 2 di depan WTC Kota Jambi.



Gambar 3.6

Uji Emisi hari ke 3 di Parkiran Gedung Senam Kota Jambi.





Ambang batas yang digunakan untuk menentukan lulus atau tidak lulus uji emisi adalah berdasarkan Kepmen LH Nomor 05 Tahun 2006. Adapun hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor selama tiga hari pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Data Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tahun 2021

NO	Jenis Kendaraan	Lulus Uji		Tidak lulus		Jumlah Unit
		Unit	%	Unit	%	
1	Pertalite	1210	96	48	4	1258
2	Solar	211	52	198	48	409
Jumlah						1667

Dari 1667 kendaraan yang tercatat telah di uji sejumlah 1258 unit adalah mobil berbahan bakar Pertalite dan 409 unit adalah mobil berbahan bakar solar. Untuk mobil berbahan bakar Bensin 96% lulus uji dan 4% tidak lulus uji, sedangkan untuk mobil berbahan bakar solar 52% lulus uji dan 48% tidak lulus uji, hal ini menunjukkan bahwa hampir rata-rata kendaraan berbahan bakar bensin telah melakukan perawatan atau dalam kondisi baik. Begitu juga dengan bahan bakar solar, jika dilihat dari uji opasitasnya rata-rata 52% hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah membatasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar atau Biosolar hal ini sangat bermanfaat bagi peningkatan terhadap kualitas udara khususnya bagi masyarakat Kota Jambi.

3. Pemantauan kualitas udara jalan raya (road side monitoring) Pemantauan kualitas udara jalan raya dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan 05.30 hari berikutnya. Hari pertama dilaksanakan di jalan H. Agus Salim, hari kedua di Jalan Slamet Riyadi, dan Hari ketiga di Jalan HOS Cokroaminoto Pemantauan dilakukan oleh PT. Jambi Lestari Internasional sebagai laboratorium rekanan yang ditunjuk. Hasil pengujian di laboratorium terhadap sample pengujian kualitas jalan raya/road side di tiga titik lokasi untuk ketujuh parameter adalah memenuhi baku mutu. Ambang baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Lampiran VII Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 3.7
Alat Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya



Pemantauan kinerja lalu lintas (traffic counting) Pemantauan kinerja lalu lintas (traffic counting) hari pertama dilakukan di Jl. H. Agus Salim (Depan Kantor DLH Provinsi Jambi), hari kedua di Jalan Slamet Riyadi (depan kantor BPJS/Jamsostek) dan hari ketiga di jalan Jl. HOS Cokroaminoto. Camcorder untuk pemantauan ditempatkan di titik lokasi yang sama dengan penempatan alat pemantau kualitas udara jalan raya.

VCR adalah perbandingan antara jumlah kendaraan yang melintas dengan kapasitas maksimum yang dapat ditampung ruas jalan tersebut, dan merupakan gambaran dari tingkat pelayanan ruas jalan. Standar nilai VCR yang ditetapkan berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia (NKJI,1997). Dengan diketahuinya nilai rata-rata kecepatan lalu lintas (SMS) dan nilai VCR atau DS per jalan dari semua jalan yang dipantau maka dapat diketahui dengan mudah level atau tingkat pelayanan (LoS) dari masing-masing jalan. Berdasarkan grafik dibawah inilah kita bisa tentukan nilai LoS dengan cara menyilangkan nilai VCR atau DS dengan nilai SMS ke dalam grafik maka akan diperoleh nilai LoS untuk setiap jalan maupun nilai LoS Kota.

Untuk pemantau kinerja lalu lintas, berdasarkan perhitungan menggunakan Software data base Langit Biru menunjukkan Nilai VCR (Volume Capacity Ratio) sebagai berikut :

Tabel 3.21
VCR Pada Ketiga Ruas Jalan yang Dipantau

No	Jalan	VCR Maksimum
1	H. Agus Salim	0,88
2	Slamet Riyadi	0,44
3	HOS Cokroaminoto	0,70

Selanjutnya nilai LoS yang diperoleh tersebut maka situasi lalu lintas dan pelayanan jalan dapat digambarkan secara teknis seperti dalam Tabel 3.24 Kriteria tingkat pelayanan (TP) jalan dibawah ini sebagaimana yang tercantum dalam MKJI.

Dengan diketahuinya nilai (LoS) dari masing- masing jalan dan kota maka keterangan karakter lalu lintas yang tergambar menunjukkan kondisi rill lalu lintas.

Tabel 3.22
Kriteria Tingkat Pelayanan (TP) Jalan

NO	Tingkat pelayanan	Kreteria	Nilai	Keterangan
1	A	TP Sangat tinggi	0,00 - 0,20	Kondisi arus bebas kecepatan tinggi Volume lalu lintas rendah
2	B	TP Tinggi	0,21 - 0,44	Arus stabil kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas
3	C	TP Sedang	0,45 - 0,74	Arus stabil kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan
4	D	TP Rendah	0,75 - 0,84	Arus mendekati tidak stabil kecepatan masih dapat dikendalikan V/C masih dapat ditolerir
5	E	TP Sangat rendah	0,85 - 1,00	Arus tidak stabil kecepatan kadang terhenti permintaan mendekati kapasitas
6	F	TP Sangat-sangat rendah	>1.00	Arus dipaksakan kecepatan rendah volume dibawah kapasitas antrian panjang

Berdasarkan dari tabel kriteria diatas, tingkat pelayanan pada jalan H. Agus Salim berada pada peringkat D yang berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang masuk kriteria rendah. Tingkat pelayanan pada jalan Slamet Riyadi berada pada tingkat B berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kreteria tinggi sampai sangat tinggi. Sedangkan tingkat pelayanan pada jalan HOS Cokroaminoto berada pada tingkat C yang berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria rendah sampai dengan sedang.

Faktor Pendorong :

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time.
2. Bertambahnya luasan RTH.
3. Pada tahun 2022 bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga tidak terjadi dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah.
2. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Jambi, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

Adapun program pendukung mencapainya target pada indikator Indeks Kualitas Udara antara lain:

1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
9. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

8. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan didapat dari perhitungan data citra satelit *google earth* yang mana setelah dilakukan perhitungan tersebut didapat data luas tutupan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hutan Kota dan Taman Keanekaragaman hayati. Setelah dikonversi didapatkan hasil IKTL sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan

	Indikator Kinerja	Tahun 022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,87	49,92	111,25%	Sangat Tinggi

Capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Tutupan Lahan" adalah sebesar 49,92 dari target sebesar 44,87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 111,2%, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan di tahun 2022.

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Tutupan Lahan" tahun ini adalah sebesar 111,2%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 dari nilai 49,91 menjadi nilai 49,92 ditahun 2022 maka terjadi kenaikan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 0,1 bila dibandingkan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kerjanya mencapai 111,2%.

Tabel 3.27
Data Luas Tutupan Lahan Vegetasi dan Hasil Konversi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Nilai Konversi	Luas (Ha)	Total Luas
1	RTH Hutan Kota*	0,6	89,97	53,98
2	RTH Sempadan Sungai*	0,6	2.250,095	1.350,057
3	RTH Sempadan Danau*	0,6	137,91	82,746
4	RTH Taman Kota	0,6	13,14	7,88
5	RTH Median Jalan*	0,6	12,22	7,33
6	RTH Perumahan	0,6	20,63	12,38
7	Kebun Binatang*	0,6	6,920	4,152
8	RTH Pemakaman	0,6	9,40	5,74
9	RTH Taman Kantor/Instansi	0,6	1,93	1,158
10	RTH Lapangan Milik Kantor	0,6	21,76	13,055
11	RTH Kebun Milik Masyarakat	0,6	6.187,38	3.712,428
TOTAL			8.751,36	5.250,81

perhitungan IKTL terlampir pada lampiran IV

Adapun program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah :

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (3 lokasi hutan kota).
 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.

Faktor Pendorong :

1. Masih adanya penambahan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau.
2. Koordinasi antar OPD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik.



Faktor Penghambat :

1. Tidak semua RTH di Kota Jambi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
2. Adanya alih fungsi lahan

Adapun program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (3 lokasi hutan kota, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati).
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Ketahanan Pangan

9. Indeks Ketahanan Pangan

Pengembangan ketahanan pangan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kota Jambi 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan

	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Badan Pangan Nasional	80	77,50	96,87	baik

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2022 sebesar 77,50 (angka sementara BPS) dengan capaian 96,87 persen dari target sebesar 80. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh tingkat inflasi Kota Jambi yang tinggi dan diatas rata-rata nasional.

Tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama dari aspek pemanfaatan pangan yang bobotnya mencapai 55 % dari total IKP. Disamping itu menurunnya IKP Kota Jambi juga disebabkan oleh angka kemiskinan relatif tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian 2021 IKP Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 2,2 poin.

Untuk menjaga Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pengendalian inflasi antara lain melalui Gerakan Ayo Menanam Cabai, pengadaan pasar murah dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah. Selain itu juga menekan angka kemiskinan melalui pemberian subsidi (miskin ekstrim) dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada tahun 2021 target IKP sebesar 78 dengan realisasi sebesar 79,73 atau naik sebesar 1,73 atau capaian naik sebesar 102,2% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2022 realisasi IKP sebesar 77,5 yang berarti hanya tercapai hanya sebesar 96,9% atau turun 2,43 poin realisasinya dari tahun 2021. Tahun 2022

target IKP Kota Jambi tidak terpenuhi secara umum disebabkan oleh penurunan peningkatan rasio konsumsi terhadap kesediaan pangan dan peningkatan angka konsumsi. Serta tingkat inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2022 juga mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya pangan, sehingga tingkat konsumsi dari pemanfaatan pangan oleh masyarakat terpengaruh dan menurun nilai dari aspek pemanfaatan pangan.

Namun dukungan pemerintah sangat kuat dalam hal menyediakan sarana dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi keterjangkauan akses pangan, masyarakat. Khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan intervensi program dan kegiatan berikut :

1. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Bantuan bibit, Pekarangan Pangan Lestari
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
3. Program Pengawasan Pangan melalui uji teskid pangan segar yang tercemar
4. Program pengelolaan Perikanan Budidaya melalui pembinaan terhadap UPR-UPR yang ada di Kota Jambi
5. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui bantuan bibit hortikula, yang didukung oleh adanya program penyuluhan untuk mendampingi petani,
6. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui uji sampel olahan pangan dari daging, penyediaan Daging yang ASUH serta memeriksa dan menanggulangi penyakit hewan menular terus dilaksanakan agar IKP Kota Jambi naik atau stabil dari tahun sebelumnya,
7. Program Penyuluhan Pertanian
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
12. Program Penyelenggaraan Jalan
13. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sementara itu target persentase peningkatan PAD tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 Kota Jambi sebesar 9 persen dengan realisasi sebesar 13,56 persen. Persentase capaian kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 150,67 persen, ini merupakan kategori capaian kinerja sangat tinggi. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
10.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9%	13,56%	150,67	Sangat Tinggi

Pemerintah Kota Jambi telah berhasil melakukan sejumlah upaya optimalisasi PAD ke subjek maupun objek Pajak dan Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seperti pendataan, pemuktahiran, penertiban dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Tabel 3.30
Rekapitulasi PAD Kota Jambi Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Komponen PAD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	% Peningkatan/ (Penurunan)
1.	Pajak Daerah	244.726.978.039,00	301.796.809.124,00	23,32
2.	Retribusi Daerah	51.844.265.427,60	40.216.623.270,14	-22,43
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.638.772.829,50	10.528.936.340,30	9,24
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.520.627.495,36	84.343.087.653,56	7,42
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		384.730.643.791,46	436.885.456.388,00	13,56

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu, Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan:

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan pokok pajak piutang
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Adanya Relaksasi Ekonomi yang berpengaruh terhadap pencapaian target pajak seperti pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Air Tanah seperti penerapan PPKM level IV beberapa bulan tahun 2021.

Hambatan dalam piutang :

a. Piutang Pajak Daerah

1. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.
2. Wajib Pajak pindah tanpa pemberitahuan.
3. Wajib Pajak tutup usaha tanpa adanya laporan.
4. Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak
5. Belum adanya kebijakan dalam penghapusan piutang pajak

b. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

1. Data Tunggakan yang tidak valid
2. Wajib Pajak tidak diketahui (No Name)
3. Terdapatnya SPPT PBB ganda (double) dan Batal
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Adapun upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain, Solusi dalam pencapaian target Pendapatan :

1. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikut sertakan pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Jambi untuk mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan akan kegunaan pembayaran pajak.
3. Melakukan pemasangan stiker pengawasan dan peringatan sebagai sanksi kepada wajib pajak.
4. Merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi lapangan
5. Memaksimalkan sistem aplikasi yang terintegrasi.
6. Memaksimalkan alat pemantauan pajak pada objek pajak.
7. Melakukan inovasi dalam pajak daerah

Solusi dalam piutang :

1. Melakukan pendataan ulang/pemutakhiran data PBB sehingga tidak ada SPPT ganda (double)
2. Memaksimalkan penagihan terhadap wajib pajak
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang.
4. Melakukan penghapusan bukuan piutang berdasarkan pertimbangan dan peraturan yang ada.
5. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kebenaran data tunggakan.
6. Perlu Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai target yang telah ditentukan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Program Aplikasi Informatika
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6. Program Pelayanan Penanaman Modal
7. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis 7 Meningkatkan Realisasi Investasi

11. Realisasi Investasi

Kegiatan investasi / penanaman modal sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi daerah dikarenakan investasi adalah gerbang pembangunan. Dengan adanya investasi berdampak pada meningkatnya perekrutan tenaga kerja dari masyarakatnya yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga aktivitas ekonomi di suatu daerah di Kota Jambi tetap berputar.

Dikarenakan pentingnya kegiatan investasi / penanaman modal dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Jambi melaksanakan promosi, melayani, mengawasi serta membina kegiatan investasi/ penanaman modal di wilayah Kota Jambi dengan harapan masuknya dan meningkatnya investasi di Kota Jambi dengan harapan akan berdampak pada kesejahteraan wilayah Kota Jambi.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, promosi, pemantauan serta pembinaan terhadap kegiatan investasi penanaman modal, sangat dibutuhkan Data Realisasi Investasi sebagai acuan bagi DPMPTSP Kota Jambi untuk mengetahui seberapa besar kegiatan dan potensi arah investasi/ penanaman modal, mengukur dampak pemerintah atas kegiatan investasi/penanaman modal serta menentukan kebijakan yang tepat bagi kegiatan investasi / penanaman modal di wilayah Kota Jambi.

Dalam pengumpulan dan keakuratan data realisasi investasi sangat dibutuhkan kolaborasi dengan stakeholder dan paling utama adalah dari pelaku kegiatan penanaman modal. Data realisasi investasi tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah investasi yang terjadi menggunakan tenaga kerja yang diserap dari Kota Jambi atau mengetahui apakah pelaku investasi menggunakan bahan lokal atau berkerjasama dengan pihak UMKM lokal.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Realisasi Investasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
11.	Realisasi Investasi	498.35 M	744,785 M	149,45	Sangat Tinggi

Realisasi investasi didapatkan dari laporan. Penanaman modal dari pelaku usaha baik secara triwulan maupun semester setiap tahunnya. Pada tahun 2022 target realisasi investasi sesuai RPJM sebesar 498.350.000 dan pada tahun 2022 realisasi

investasi di Kota Jambi tahun 2022 sebesar 744.825.000 atau dengan capaian 149,45%.

Tabel 3.32
Realisasi Investasi Tahun 2022

	TRIWULAN	PROYEK	TKI	TKA
PMA TW I	16.219.805.000	15	-	-
PMA TW I	30.480.100.000	244	8.294	-
PMA TW II	10.924.655.000	8	-	-
PMA TW II	344.730.000.000	245	7.547	-
PMA TW III	4.451.370.000	19	-	-
PMA TW III	80.460.800.000	506	9.730	-
PMA TW IV	60.136.545.000	20	-	-
PMA TW IV	197.381.800.000	449	12.110	-
TOTAL	744.785.075.000	1.506	37.681	-

Penyebab Keberhasilan atau kesulitan dalam pencapaian realisasi investasi antara lain :

- a) untuk kegagalan, sulitnya akses untuk masuk lebih jauh ke dalam suatu perusahaan dalam mengkroscek nilai realisasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dilaporkan;
- b) kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pelaporan penanaman modal.

Sementara untuk keberhasilan yang didapat atas beberapa upaya dan program yang dilakukan antara lain :

1. Komitmen dalam melaksanakan sosialisasi LKPMp;
2. Membantu mencari solusi dan mengatasi masalah yang terjadi di pelaku usaha dalam masalah pelaporan realisasi investasi;
3. Selalu mengingatkan dan memberitahu pelaku usaha apabila telah memasuki periode pelaporan.

Upaya untuk meningkatkan realisasi di Kota Jambi adalah dengan cara menarik minat dan mendatangkan para Investor untuk berinvestasi di Kota Jambi dengan cara memberikan informasi Peluang Investasi dan Peta Potensi yang ada di Kota Jambi dari berbagai Sektor.

Selain itu Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan;
2. Meningkatkan Pengembangan data/informasi di bidang perizinan;
3. Melakukan Penyempurnaan dan harmonisasi dengan PD teknis terkait perizinan dan non perizinan terhadap regulasi yang sekiranya menghambat proses pelayanan perizinan dan Non perizinan;
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan maupun izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat;



5. Sistem pelayanan perlu dirubah agar terjadi efisiensi waktu dan sumber daya manusia (SDM). Perubahan tersebut antara lain melakukan setting ulang penempatan dan pembagian SDM sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi pelayanan (customer service, informasi, verifikasi berkas, data entry, petugas lapangan, penyerahan izin dan pembuatan SKRD/laporan);
6. Perlu diadakan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai DPMPTSP Kota Jambi. Kegiatan tersebut antara lain diklat, bintek, pendidikan berjenjang dan lainnya;
7. Penerapan SP dan SOP harus diterapkan secara disiplin;
8. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai sentra petizinan telah berjalan secara optimal dengan tunjang oleh SDM, sarana serta prasarana yang efektif dan efisien.

Dalam Penggunaan Sumber Daya yang diperdayakan guna meningkatkan realisasi investasi ialah sumber daya yang menguasai kemampuan di bidang Penanaman Modal yang telah dibekali oleh berbagai pelatihan dan Bimbingan terkait Penanaman Modal dan LKPM.

Adapun program pendukung untuk mencapai target Realisasi Investasi adalah sebagai berikut:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Pelatihan Kerja Produktifitas Tenaga Kerja
3. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6. Program Pelayanan Penanaman Modal
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
9. Program Penyelenggaraan Jalan

Sasaran Strategis 8 Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

12. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pemerintah Kota Jambi perlu menurunkan TPT karena hal ini berimbas pada penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2022 angka TPT sebesar 8,95 persen (27.158 jiwa/303.517 jiwa) dari target 9.60 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2021 kondisi ini menurun 1,71 persen dari 10,66 persen (31.375 jiwa/294.349 jiwa).

Turunnya Angka TPT ini disebabkan oleh mulai membaiknya aktivitas perekonomian masyarakat setelah pandemi covid 19. Hal ini ditandai dengan beberapa perusahaan mulai membuka lowongan kerja, pemilik usaha yang selama masa pandemi menutup usahanya, telah berangsur menjalankan usahanya kembali, dan pelaku UMKM yang semula menjadi pekerjaan alternatif, makin diarahkan untuk menjadi usaha mandiri yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Kota Jambi melalui DTKK-UKM telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menekan angka TPT yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan berbasis kompetensi bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan
2. Memberikan layanan antar kerja bagi pencaker
3. Membina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
4. Pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
5. Membina UMKM untuk dapat menciptakan lapangan kerja

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	9,8	8,95	108,85%	Sangat Tinggi

Indikator pertama pada urusan ketenakerjaan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan rumus pengukuran serta capaian tahun 2022, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 = \frac{27,158}{303,517} \times 100 = 8,95\%$$

Meski selama pandemi ditahun 2020 dan 2021, jumlah pengangguran cukup tinggi, tetapi justru meningkatkan jumlah pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena PHK atau dirumahkan, memilih menjadi pelaku UMKM sebagai pekerjaan alternatif selama pandemi, ditambah dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan bantuan dan kemudahan bagi pelaku UMKM. Semakin bertambahnya jumlah pelaku UMKM, maka akan berdampak pada semakin besar pula jumlah penduduk yang bekerja.

Konsep Ketenagakerjaan



- Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif mencari pekerjaan atau yang bekerja.
- Penduduk Usia Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja maupun yang tidak bekerja (tidak bekerja : pelajar, Ibu rumah tangga, kelompok penerima pendapatan seperti lansia). Angkatan kerja terdiri dari 2 (dua) variable, Pengangguran dan Bekerja.
- Pengangguran terdiri dari : penduduk yang bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, penduduk yang mempersiapkan usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), penduduk yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Dari bagan tersebut, dapat dijelaskan kontribusi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM adalah :

- Menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Jambi Tahun 2022-2027 yang menjadi pedoman arah pembangunan ketenagakerjaan di Kota Jambi
- Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi bagi penduduk usia kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja (memiliki kartu AK1),
- memberikan layanan antar kerja bagi melalui informasi pasar kerja (IPK) online dan offline, serta memfasilitasi perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan di wilayah Kota Jambi
- membina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja, sekaligus lembaga yang berperan langsung dalam meningkatkan keahlian (skill) masyarakat umum yang membutuhkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran (tabel merah) menjadi angka bekerja (tabel hijau).

Selain kegiatan tersebut, juga melaksanakan upaya agar angka Bukan Angkatan Kerja (tabel biru) berkurang dan beralih ke angka Angkatan Kerja. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu :

- Pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar siswa yang telah menyelesaikan sekolah dan belum/tidak meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi, untuk aktif mencari pekerjaan (pihak sekolah bekerjasama dengan perusahaan dalam rangka penempatan/penyaluran alumninya) atau membuka usaha (variabel : sekolah).
- melaksanakan koordinasi dengan bidang UMKM untuk memotivasi penduduk yang mengurus rumah tangga dan yang tidak sekolah/tidak mencari kerja/tidak menyiapkan usaha (variabel : lainnya) untuk meningkatkan keahlian melalui pelatihan wirausaha pemula guna mencari pekerjaan atau membuka usaha.

Untuk pencapaian indikator ke - 1 sasaran ke -1 , Bidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja, sebagai penanggung jawab telah menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 105.605.512,- (seratus lima juta enam ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 61.397.712,- (enam puluh satu juta tiga ratus

sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Jambi Tahun 2022-2027, yang merupakan dokumen pedoman arah pembangunan ketenagakerjaan di Kota Jambi selama 5 tahun kedepan. Dokumen RTKD memuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada pasar kerja. Penyusunan dokumen RTKD ini melibatkan beberapa instansi terkait yang berperan dalam urusan ketenagakerjaan, baik data kondisi saat ini hingga proyeksi kondisi dan capaian 5 (lima) tahun kedepan.

Anggaran sub kegiatan ini dialokasikan untuk biaya rapat penyusunan dokumen (ATK dan makan minum), biaya transportasi akomodasi dan honorarium narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja RI, dan honorarium tim penyusun dokumen RTKD Kota Jambi yang ditetapkan dengan SK Walikota Jambi.

Selisih penggunaan anggaran sebesar Rp. 44.207.800,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah anggaran akomodasi dan transportasi narasumber yang semula dianggarkan 2 (dua) orang, hanya terealisasi 1 (satu) orang dan bisa hadir secara online 1 kali pertemuan, untuk 3 kali pertemuan berikutnya dilakukan secara virtual.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.388.023.459,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 383.019.093,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu sembilan puluh tiga rupiah)

Anggaran pada sub kegiatan ini bersumber dari :

1) APBD Kota Jambi

Jumlah anggaran Rp. 387.307.804,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) dan direalisasikan Rp. 383.019.093,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja terdaftar. Masing-masing pelatihan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari untuk memenuhi 200 (dua ratus) jam pelajaran sebagai syarat pelatihan berbasis kompetensi, dengan memberikan fasilitas makan minum, baju kaos seragam



peserta, uang transport peserta, serta sertifikat pelatihan. Juga dialokasikan untuk rekening ATK, alat percontohan pelatihan, sewa alat pelatihan, honorarium narasumber dan gaji 2 (dua) orang tenaga kerja kontrak bidang penempatan, produktivitas dan pelatihan tenaga kerja.

Untuk sub kegiatan ini, telah dilaksanakan 4 (empat) jenis kegiatan pelatihan, yaitu ;

- 1) Pelatihan Barista : 16 orang
- 2) Pelatihan Design Grafis : 16 orang
- 3) Pelatihan Instalasi Listrik : 16 orang
- 4) Pelatihan Komputer Dasar : 16 orang

Penetapan jenis pelatihan berkompetensi disesuaikan dengan analisa kebutuhan pasar kerja di Kota Jambi, minat dari pencari kerja terdaftar, peluang usaha yang akan dibuka oleh peserta setelah mengikuti pelatihan, serta ketersediaan sarana pelatihan dan instruktur yang berkompeten.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dikarenakan peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan dengan baik, hingga dinyatakan lulus 100%, serta didukung sarana prasarana pelatihan yang memadai dan instruktur yang berkompeten di bidangnya.

Namun jumlah quota peserta pelatihan belum sebanding dengan jumlah pencaker yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan. Serta jenis pelatihan yang ditetapkan belum mengakomodir minat dan bakat pencaker secara lebih luas, dikarenakan masih ada beberapa jenis pelatihan berkompetensi yang belum memiliki instruktur bersertifikat kompetensi dan sarana pendukung lainnya untuk wilayah Kota Jambi. Kedepannya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi akan semakin aktif menjalin kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi maupun dengan BLK di Kota Padang, guna mengakomodir pencaker terdaftar yang berminat mengikuti pelatihan sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan pasar kerja.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.000.715.655,- (satu milyar tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk rekening belanja alat yang diserahkan kepada masyarakat, yang merupakan tindak lanjut dari program kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi dan baru dianggarkan pada bulan Desember 2022.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan alat/sarana

usaha bagi alumni peserta pelatihan berbasis kompetensi yang telah membuka usaha secara mandiri, sebagai salah satu langkah Pemerintah Kota Jambi untuk menahan laju inflasi.

Akan tetapi, anggaran ini belum dapat direalisasikan dikarenakan jenis-jenis barang/peralatan yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat belum memenuhi kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu syarat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai petunjuk tim TPID, selisih penggunaan anggaran DID tersebut, akan ditindaklanjuti pada perubahan DPA TA 2023.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.348.850,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.310.850,- (enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang ada di Kota Jambi, sebagai mitra dalam membangun SDM pencari kerja berkeahlian. Saat ini di Kota Jambi telah ada 25 (dua puluh lima) LPKS.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan pentingnya akreditasi bagi LPKS dan memfasilitasi perizinan dan akreditasi bagi LPKS yang masa izin usaha sudah jatuh tempo dan yang belum terakreditasi.

Untuk sub kegiatan ini alokasikan rekening ATK, makan minum peserta, honorarium nara sumber dan uang transport peserta.

c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.574.850,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 20.537.150,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pembinaan pada 25 (dua puluh lima) UMKM yang telah dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Pembinaan berkelanjutan terus dilaksanakan agar perusahaan kecil tersebut semakin mengembangkan usaha (produktivitas) dan menyerap tenaga kerja. Perusahaan kecil yang telah dibina dan dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang meningkatkan produktivitasnya, akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan Sidhakarya (tingkat provinsi) dan penghargaan Paramakarya (tingkat

nasional).

Untuk sub kegiatan ini dialokasikan rekening ATK, makan minum, honorarium narasumber, dan uang transport peserta.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

– Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja

Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 96.084.080,- (sembilan puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 86.979.185,- (delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan audit dan sertifikasi manajemen ISO dari lembaga independen, yang merupakan kegiatan rutin tahunan bagi bidang penempatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja (penta latas), sebagai bidang yang memberikan pelayanan pembuatan kartu AK1 bagi pencari kerja.

Untuk tahun 2022, bidang penta latas telah berhasil lulus audit dan meraih sertifikat ISO 9001:2015 tahun 2022.

Untuk sub kegiatan ini dialokasikan rekening ATK, makan minum rapat, belanja jasa audit/surveillance ISO, dan belanja transportasi akomodasi auditor ISO. Selisih penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.066.895,- (sembilan juta enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu efisiensi belanja transportasi dan akomodasi auditor ISO.

– Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.127.310,- (enam belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.089.310,- (enam belas juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya keberadaan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk terus berperan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga dapat menyalurkan alumninya untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. Saat ini terdapat 24 (dua puluh empat) BKK di Kota Jambi.

Untuk sub kegiatan ini dialokasikan rekening ATK, makan minum peserta, honorarium narasumber dan uang transport peserta.

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

– Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan sebesar Rp. 108.396.519,-



(seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.102.392.198,- (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pelayanan rutin bagi pencari, yaitu pelayanan pembuatan kartu AK1 (kartu pencari kerja), dan AK2, AK3, AK4 dan AK5, sebagai administrasi lanjutan dalam mendata pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan pada lowongan yang tersedia di Informasi Pasar Kerja (IPK).

Anggaran dialokasikan untuk rekening cetak kartu AK1, AK2, AK3, AK4 dan AK5, rekening gaji 3 (tiga) orang TTK pada bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan rekening biaya rapat dengan beberapa perusahaan di Kota Jambi (rapat dilaksanakan guna meningkatkan kolaborasi dalam menyikapi dan mencari solusi masalah ketenagakerjaan di Kota Jambi).

Sasaran Strategis 9 Meningkatkan Derajat Kesehatan

13. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan AHH harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Pada tahun 2022, realisasi AHH Kota Jambi 72,99 tahun dari target 72,81 tahun. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pada mutu kesehatan dasar dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Dibandingkan capaian realisasi tahun 2021, AHH mengalami peningkatan dari 72,71 tahun menjadi 72,99 tahun.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
13.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,81	72,99	100,25%	Sangat Tinggi

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung dan dipublikasi oleh BPS beserta tim pakar di pusat. AHH menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi oleh angka kematian ibu, angka kematian bayi serta angka kesakitan. AHH 72,99 sendiri menunjukkan arti bahwa bayi yang lahir pada 2022 kemungkinan akan hidup sampai umur 72,99 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya dinegara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya dinegara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Untuk meningkatkan AHH di Kota Jambi telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
2. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular



3. Peningkatan PHBS pada masyarakat
4. Melaksanakan program kesehatan ibu dan anak dengan inovasi SIKOMO (Sistem Informasi dan Komunikasi Obstetri/kebidanan)
5. Meningkatkan akses dan utilitas perkotaan
6. Pengendalian angka kelahiran
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
8. Meningkatkan kemitraan stakeholder

Adapun program pendukung untuk mencapai target Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

14. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Ada pun yang menjadi asumsi HLS adalah kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya berbanding dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Pada tahun 2022, Disdik Kota Jambi menargetkan angka HLS Kota Jambi sebesar 15,38 tahun. Berdasarkan rilis dari BPS tahun 2022 realisasi HLS Kota Jambi sama dengan target yang telah dicanangkan yakni sebesar 15,38 tahun. Artinya penduduk Kota Jambi pada tahun 2022 ini diharapkan menyelesaikan pendidikan telah tamat SMA/SMK (12 tahun) dan hampir setara dengan jenjang pendidikan Diploma III, mendekati jenjang S1 atau D IV (3,38 Tahun).

Dibandingkan tahun 2021, angka HLS ini naik 0,01 dari 15,37 tahun. Hal ini menunjukkan upaya pengelolaan pendidikan yang berfokus pada peningkatan dan perluasan akses serta kualitas pendidikan di Kota Jambi berada pada langkah yang tepat. Berbagai kegiatan yang dilakukan mencakup:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pengembangan minat dan bakat peserta didik
3. Bantuan perluasan akses seperti penyediaan perlengkapan belajar
4. Pemberian bantuan siswa miskin yaitu melalui program Kartu Jambi Cerdas (KJC)
5. Peningkatan manajemen dan pengelolaan pembelajaran
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
7. Upaya Bersama lintas sektoral dalam mengatasi kenakalan remaja

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
14.	Harapan Lama Sekolah	15,38	15,38	100	Sangat Tinggi

Adapun program pendukung untuk mencapai target Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut :



1. Program Penataan Bangunan Gedung
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kenutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Program Pelatihan Kerja fan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7. Program Informasi dan Komunikasi Publik
8. Program Pembinaan Perpustakaan

Sasaran Strategis 11 Meningkatkan Kesetaraan Gender

15. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang melihat keterlibatan perempuan di parlemen, sumbangan pendapatan perempuan, dan perempuan sebagai tenaga profesional. IDG di Kota Jambi pada tahun 2021 hanya mencapai 67,88 menurun dari 68,11 pada tahun 2020 dan angka pada tahun 2020 menurun dibandingkan angka 68,48 dari tahun 2019.

Komponen pembentuk posisi tertinggi dalam perhitungan IDG di Kota Jambi adalah komponen persentase perempuan sebagai tenaga profesional, kedua adalah sumbangan pendapatan perempuan, dan terakhir keterlibatan perempuan di parlemen. Ketimpangan besar capaian IDG di Kota Jambi tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa hambatan yaitu :

1. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen memiliki nilai presentase paling rendah. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti sistem partai, dukungan partai terhadap perempuan masih rendah karena ditopang oleh kebijakan partai yang bias gender dan pendidikan publik yang dilakukan media untuk mendorong representasi perempuan di parlemen masih belum maksimal.
2. Komponen sumbangan pendapatan perempuan yang cenderung turun dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor antara lain masa pandemi covid-19 mengakibatkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68.4	67.88 (2021)	99,24	Sangat Tinggi



Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender antara lain :

- Melakukan pendidikan politik, sosialisasi/diklat/pelatihan tentang peranan perempuan di parlemen/dunia politik.
- Memperkuat strategi pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Melakukan pelatihan bagi kelompok rentan dan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk peningkatan pendapatan ekonomi

Adapun program pendukung untuk mencapai target Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
5. Program Pemberdayaan Sosial
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7. Program Pengelolaan Pendidikan

Sasaran Strategis 12 Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan

16. Indeks Pembangunan Pemuda

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tidak terlepas dari konteks bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2025 hingga 2030. Dalam periode ini, Kota Jambi diharapkan mampu memetik keuntungan dari proporsi populasi kelompok usia produktif yang lebih besar dari pada populasi kelompok usia tidak produktif.

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
16.	Indeks Pembangunan Pemuda	57,95	57,96	100,02%	Sangat tinggi

Dengan jumlah penduduk pemuda mencapai hampir seperempat jumlah keseluruhan penduduk saat ini, Kota Jambi berpeluang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Kualitas pemuda Kota Jambi akan menjadi salah satu penentu untuk mendapatkan peluang tersebut. Dengan demikian, investasi pada kelompok pemuda saat ini akan menentukan dividen yang diraih Kota Jambi pada masa mendatang. Membangun pemuda tidak hanya berarti membangun individu pemuda, tetapi juga membangun lingkungan sekitar yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka.

Oleh karena itu, pembangunan pemuda harus bersifat lintas bidang yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi, politik dan kesetaraan gender. Pembangunan pemuda juga harus berpegang pada prinsip bahwa pemuda adalah objek dan sekaligus subjek pembangunan. Selain itu, mengingat kondisi antar individu atau kelompok pemuda tidak homogen, perlu dipastikan bahwa hasil dari pembangunan pemuda bias dinikmati secara merata oleh setiap kelompok, baik laki-laki maupun Perempuan. Menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan pemuda merupakan hal strategis dan sangat penting bagi Indonesia, maka dibutuhkan pemetaan dan pengkajian tentang kemajuan yang telah dicapai dalam rangka memberi perhatian lebih pada area yang perlu ditingkatkan.

Salah satu cara untuk melakukan pemetaan dan pengkajian itu dilakukan melalui penyusunan indeks yang dapat menggambarkan capaian terhadap isu-isu kepemudaan. Keberadaan indeks ini akan memudahkan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan terpadu.

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Jambi tahun 2022 mengalami peningkatan secara umum dari IPP Nasional dan Propinsi Jambi dibandingkan tahun 2021. Dari gambaran menyeluruh Indeks Pembangunan Pemuda kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2021 : 57,91 % dan Tahun 2022 : 57,96 %.

Sumbangan terbesar adalah Domain Pendidikan telah mencapai 91,75 % dengan indikator pemuda Kota Jambi umur 16 – 30 tahun minimal sudah berpendidikan Strata 1 , selanjutnya Domain Lapangan dan kesempatan Kerja juga meningkat dari tahun 2021: 66,5% naik tahun 2022 : 62 % dengan Indikator meningkatnya Pemuda untuk berwirausaha sendiri, bekerja maupun bekerja dibantu buruh sehingga mengurangi pengangguran, Domain Kesehatan dan kesejahteraan dengan indikator angka kesakitan pemuda, menikah dibawah umur, pemuda merokok tahun 2022 tinggal 0,12% selanjutnya domain gender dan diskriminasi dengan indikator Pemuda perempuan bekerja di sektor Formal meningkat dari 42,55% naik menjadi 44,01 %.

Program dan Kegiatan yang menunjang peningkatan indeks Pembangunan Pemuda adalah sebagai berikut :

1. Penysadaran Pemuda
2. Pemberdayaan Pemuda
3. Pengembangan Pemuda
4. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
5. Pembinaan Kewirausahaan Pemuda Pemula
6. Pembinaan Kewirausahaan Pemuda Berkembang
7. Pembinaan Pemuda Pelopor
8. Pembinaan Pemuda Inti anti Narkoba
9. Bimbingan Mental pemuda
10. Pembinaan Paskibraka
11. Pembinaan Duta Pancasila dan Duta Anti Narkoba
12. Kunjungan Pemuda ke dunia usaha dan Industri
13. Diklat Kepemimpinan

Adapun program pendukung untuk mencapai target Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
3. Program Persentase Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Jambi dianggarkan melalui APBD Perubahan Kota Jambi Tahun anggaran 2022 dengan total sebesar Rp. 1.812.932.658.629,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.622.847.922.178,57 dengan serapan mencapai sebesar 89,52%, uraian realisasi keuangan program dapat dilihat sebagai berikut:

NO (1)	PROGRAM (2)	ANGGARAN (3)	REALISASI (4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	313.490.031.893,00	263.151.956.266,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	158.763.917.938,00	151.471.237.190,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	28.919.870,00	24.031.750,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	79.392.800,00	49.588.000,00
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	132.326.207,00	120.044.515,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.296.204.113,00	198.382.870.014,96
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.631.791.662,00	64.511.461.425,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.652.278.165,00	1.509.927.692,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	685.384.826,00	624.508.753,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.599.364,00	576.032.212,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.357.093.343,00	15.376.693.469,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	31.052.932.890,00	30.567.379.351,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.959.483.620,00	9.822.101.940,00
14	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.776.842.025,00	1.775.798.025,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.099.334.849,00	9.665.534.620,00
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.358.967.500,00	1.355.292.900,00
17	Program Pengembangan Permukiman	47.165.247.879,00	47.058.643.940,00
18	Program Penataan Bangunan Gedung	148.069.062.057,00	122.327.031.512,00
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.658.407.221,00	5.605.574.335,00
20	Program Penyelenggaraan Jalan	56.708.919.400,00	56.346.737.556,00
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.950.513.029,00	1.789.293.195,00
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.661.413.300,00	1.400.414.213,00
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.470.995.868,00	6.463.880.747,00
24	Program Pengembangan Perumahan	1.070.703.191,00	938.427.933,00
25	Program Kawasan Permukiman	5.812.315.558,00	2.516.483.028,00
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	29.389.501.042,00	28.577.782.776,00
27	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.619.495,00	4.987.000,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.140.851.793,00	8.728.088.006,00
29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.202.807.820,00	7.119.087.398,00
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.931.015.360,00	7.515.272.434,00
31	Program Penanggulangan Bencana	696.420.693,00	542.308.414,00
32	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.587.076.469,00	4.430.386.045,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.098.601.978,00	6.690.737.048,00
34	Program Pemberdayaan Sosial	1.660.545.670,00	1.627.323.974,00
35	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	85.208.310,00	43.515.593,00
36	Program Rehabilitasi Sosial	1.291.283.581,00	1.197.671.265,00
37	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.126.175.808,00	1.600.487.191,00
38	Program Penanganan Bencana	737.859.710,00	693.637.640,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.815.862.516,00	5.561.545.554,00
40	Program Perencanaan Tenaga Kerja	105.605.512,00	61.397.712,00
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.424.947.159,00	419.867.093,00
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	204.630.599,00	189.371.383,00
43	Program Hubungan Industrial	376.189.361,00	367.979.512,00
44	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	765.422.308,00	753.898.119,00
45	Program Perlindungan Perempuan	365.119.900,00	274.858.684,00
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	173.310.200,00	168.585.200,00
47	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	262.520.254,00	253.079.639,00
48	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	338.626.759,00	338.571.350,00
49	Program Perlindungan Khusus Anak	604.606.251,00	481.668.386,00
50	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442.726.150,00	438.372.093,00
51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	98.996.110,00	96.687.852,00
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	493.154.756,00	489.393.158,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.736.817.156,00	11.161.845.463,00
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	14.776.080,00	13.710.778,00
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.828.778.165,00	1.755.960.427,49



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.783.655.760,00	7.654.792.957,00
57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100.130.521,00	85.004.250,00
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	375.281.111,00	342.281.142,00
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	166.530.405,00	166.338.500,00
60	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	123.154.601,00	116.336.360,00
61	Program Pengelolaan Persampahan	32.101.551.442,00	31.586.863.517,00
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.171.722.929,00	6.193.691.588,00
63	Program Pendaftaran Penduduk	273.673.290,00	266.384.690,00
64	Program Pencatatan Sipil	339.557.215,00	332.148.319,00
65	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.213.547.694,00	2.132.935.927,00
66	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960,00	32.574.960,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.875.031.975,00	5.696.857.314,00
68	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.655.201.552,00	4.634.234.621,00
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.398.661.456,00	5.163.074.683,00
70	Program Pengendalian Penduduk	250.971.951,00	250.857.599,00
71	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.697.299.991,00	3.289.446.775,00
72	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.825.447.106,00	1.181.378.858,00
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.675.873.466,00	11.168.607.989,00
74	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	11.990.483.959,00	11.607.362.119,00
75	Program Pengelolaan Pelayaran	156.305.400,00	152.370.900,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.199.463.343,00	5.964.487.412,00
77	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.842.432.286,00	4.826.901.019,00
78	Program Aplikasi Informatika	3.695.591.990,00	3.663.143.460,00
79	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	33.443.984,00	31.235.440,00
80	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	592.859.498,00	591.645.951,00
81	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	148.033.430,00	140.771.530,00
82	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	3.319.837.164,00	620.379.189,00
83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.159.765.737,00	8.376.949.645,00
84	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.323.400,00	69.653.400,00
85	Program Promosi Penanaman Modal	233.758.660,00	221.947.348,00
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.968.349,00	1.019.866.298,00
87	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	659.549.441,00	625.763.525,00
88	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.222.759,00	47.203.568,00
89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.125.760.200,00	4.734.542.363,00
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.494.830.000,00	1.484.439.390,00
91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.568.074.180,00	6.202.602.732,00
92	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.139.930.616,00	1.134.117.615,00
93	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	85.317.516,00	83.531.260,00
94	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.800.300,00	59.108.109,00
95	Program Pengembangan Kebudayaan	949.199.222,00	821.838.112,00
96	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	97.296.190,00	96.535.190,00
97	Program Pembinaan Sejarah	121.404.970,00	72.146.914,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
98	Program Pembinaan Perpustakaan	820.320.613,00	811.837.766,00
99	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	109.413.515,00	109.319.515,00
100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.653.390.978,00	7.146.772.242,00
101	Program Pengelolaan Arsip	736.843.362,00	714.266.086,00
102	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	265.435.828,00	252.739.654,00
103	Program Perizinan Penggunaan Arsip	7.482.679,00	7.482.679,00
104	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	73.255.200,00	73.105.200,00
105	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	439.175.881,00	434.693.661,00
106	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	97.214.413,00	95.784.221,00
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.158.035.410,00	4.890.750.065,00
108	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	988.777.564,00	804.800.790,00
109	Program Pemasaran Pariwisata	1.185.940.647,00	1.124.742.200,00
110	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.038.998.820,00	1.008.632.161,00
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.566.059.712,00	13.178.678.220,00
112	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.966.977.449,00	1.251.749.792,00
113	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	70.000.000,00	69.597.000,00
114	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	930.057.165,00	857.843.634,00
115	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	104.232.560,00	102.973.498,00
116	Program Penyuluhan Pertanian	413.336.845,00	389.310.193,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.647.271.847,00	8.877.297.289,00
118	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	89.524.300,00	75.727.400,00
119	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.561.135.229,00	1.530.979.350,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
120	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.017.773.446,00	955.819.050,00
121	Program Pengembangan Ekspor	79.347.196,00	78.632.569,00
122	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	117.554.090,00	114.407.925,00
123	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	989.779.458,00	925.135.127,00
124	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.479.327.215,00	1.472.897.387,00
125	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	63.744.234,00	63.171.340,00
126	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	48.642.985,00	47.969.030,00
127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.816.816.728,00	37.233.135.520,00
128	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	26.511.730.716,00	25.809.319.312,00
129	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.941.259.344,00	1.890.588.335,00
130	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.453.209.450,00	40.711.600.524,00
131	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	37.349.313.539,00	28.398.122.002,00
132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.342.161.253,00	7.732.639.645,00
133	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.121.299.264,00	945.473.911,00
134	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.211.019.387,00	1.021.530.948,00
135	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.246.364.997,00	8.073.243.765,00
136	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.538.905.228,00	14.075.612.543,00
137	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.180.555.039,00	1.159.474.621,00
138	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.659.284.219,00	21.099.944.533,00
139	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.472.225.738,00	4.728.981.146,36
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.733.062,00	8.577.279.339,00
141	Program Kepegawaian Daerah	2.259.913.048,00	1.444.331.384,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
142	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.294.131.175,00	2.529.157.624,00
143	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	683.358.616,00	630.557.656,00
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.209.047.866,00	9.059.612.615,00
145	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.227.345.000,00	810.425.000,00
146	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.126.175.000,00	636.000.000,00
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.939.737.978,00	6.745.551.095,00
148	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	333.717.315,00	328.292.830,00
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.216.007.137,00	4.136.900.736,00
150	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	463.900.450,00	426.578.950,00
151	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	526.264.450,00	511.272.300,00
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.277.776.772,00	7.099.606.229,00
153	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.994.331.129,00	1.987.718.012,00
154	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.926.121.740,00	3.861.967.752,00
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	227.608.377,00	188.450.577,00
156	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	643.972.533,00	626.609.333,00
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.306.421.286,00	8.175.005.929,00
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	217.213.870,00	216.807.133,00
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.743.826.088,00	4.688.986.558,00
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	525.085.150,00	448.575.550,00
161	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	368.032.580,00	367.957.490,00
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.501.165.103,00	5.319.368.075,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
163	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	313.651.000,00	299.917.400,00
164	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.665.335.270,00	1.522.438.664,00
165	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	582.387.635,00	540.725.850,00
166	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	460.157.301,00	433.668.500,00
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.842.041.770,00	6.624.654.972,00
168	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.324.853.111,00	2.284.696.571,00
169	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.410.106.592,00	3.395.818.008,00
170	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	499.671.800,00	464.727.800,00
171	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	211.252.500,00	211.132.500,00
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.691.195.226,00	9.401.406.369,00
173	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.851.500,00	618.576.100,00
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.989.726.850,00	4.730.510.696,00
175	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	694.050.900,00	632.855.800,00
176	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.288.711.700,00	1.273.516.950,00
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.949.023.879,00	5.723.407.404,00
178	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.423.140,00	208.437.940,00
179	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.095.742.054,00	2.038.596.852,00
180	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	364.884.998,00	332.074.998,00
181	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	339.971.499,00	321.783.999,00
182	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.137.512.507,00	6.900.883.065,00
183	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	147.758.735,00	146.983.235,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
184	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.963.385.022,00	1.804.738.090,00
185	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.649.700,00	398.532.900,00
186	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.413.500,00	257.013.500,00
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.937.564.648,00	8.775.905.063,00
188	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	691.880.276,00	691.408.462,00
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.304.408.497,00	4.255.282.164,00
190	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	430.189.000,00	393.483.300,00
191	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351.895.300,00	351.816.700,00
192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.741.567.172,00	6.173.127.772,00
193	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	420.678.810,00	403.618.410,00
194	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.592.715.446,00	3.417.892.263,76
195	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	433.035.800,00	397.585.300,00
196	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.121.450,00	285.181.750,00
197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.325.739.801,00	7.175.114.890,00
198	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	128.761.090,00	119.622.550,00
199	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.798.437.387,00	4.738.819.543,00
200	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.228.550,00	412.169.550,00
201	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	463.234.099,00	462.491.599,00
202	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.084.228,00	4.270.627.709,00
203	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	315.403.000,00	295.537.000,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
204	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.487.851.066,00	1.478.852.066,00
205	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	716.650.000,00	707.762.500,00
206	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	248.069.000,00	208.045.600,00
207	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	134.651.000,00	131.311.500,00
TOTAL		1.812.932.658.629,00	1.622.847.922.178,57

Tabel 3.41
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
108,17 %	89,52%	18,65%

Analisis efektifitas anggaran dan kinerja dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran. Dari table di atas, diketahui bahwa kinerja fisik sasaran daerah secara umum sudah tercapai melebihi 100%, dan untuk realisasi anggaran mencapai 89,52%, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi disebabkan oleh sisa anggaran lelang, sisa pengadaan barang/jasa lainnya serta penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti klaim asuransi kesehatan, perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor.



LAPORAN KINERJA 2022 PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 rata-rata mendapatkan kategori "Sangat Tinggi", karena capaian rata-ratanya diatas 108,75% dari target. Secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip good governance dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.



LAPORAN KINERJA 2022
PEMERINTAH KOTA JAMBI

LAMPIRAN



Lampiran I :

Daftar Penghargaan Yang Diperoleh Oleh Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur Cup 2022	Gubernur Jambi	Kota Jambi meraih juara penyelenggaraan ajang sepak bola Gubernur Cup 2022	Jambi, 20 Januari 2022	Wali Kota Jambi
2	Penghargaan Pemerintah Daerah Dengan Pengelolaan Keuangan Paling Efektif Terhadap Kesejahteraan Rakyat	KEMENKEU RI melalui KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	Kota Jambi meraih penghargaan terbaik III sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan paling efektif terhadap kesejahteraan rakyat dari KEMENKEU RI melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi	Jambi, 32 Januari 2022	Wali Kota Jambi
3	Penghargaan Keberhasilan mencapai target non-polio AFP (NPAFP) rate >2 per 100.000 penduduk <15 tahun, pada tahun 2021	KEMENKES RI	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan sebagai daerah dengan keberhasilan mencapai target non-polio AFP (NPAFP) rate >2 per 100.000 penduduk <15 tahun, pada tahun 2021	Jakarta, 3 Februari 2022	Wali Kota Jambi
4	PWI Award	PWI Provinsi Jambi	Wakil Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM meraih penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Award tahun 2022 sebagai Tokoh Pemerintah Multitalenta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022 di Provinsi Jambi	Jambi, 5 Februari 2022	Wakil Wali Kota Jambi
5	TOP Pembina BUMD Awards 2022	BUMD Awards	Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME meraih penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD Tahun 2022 untuk Perumda Tirta Mayang Kota Jambi pada ajang penghargaan TOP BUMD Awards 2022	Jakarta, 20 April 2022	Wakil Wali Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
6	TOP BUMD Awards Perumda Tirta Mayang Kota Jambi	BUMD Awards	Perumda Tirta Mayang Kota Jambi meraih penghargaan sebagai TOP BUMD Awards 2022 Bintang Empat pada ajang penghargaan TOP BUMD Awards 2022	Jakarta, 20 April 2022	Wakil Wali Kota Jambi
7	Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai 20 Desa/Kelurahan se-Indonesia dengan Predikat Kampung Keren Tanpa Rokok pada Acara KTR Award 2022	Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BKKBN Pusat	Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai 20 Desa/Kelurahan se-Indonesia dengan Predikat Kampung Keren Tanpa Rokok pada Acara KTR Award 2022	Yogyakarta, 14 Mei 2022	Kelurahan Lebak Bandung, Pemerintah Kota Jambi
8	Juara I Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022	BKKBN Provinsi Jambi	Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi meraih Juara I Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022 dengan Nilai 5.45	Jambi, 07 Juni 2022	Kota Jambi
9	Piagam Penghargaan Pengelola PIP Terbaik 1 Provinsi Jambi	Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Kota Jambi meraih Penghargaan Nasional sebagai Pengelola PIP Terbaik 1 Provinsi Jambi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran 2021	Jakarta, 27 Juni 2022	Dinas Pendidikan
10	Seven Media Asia Awards 2022	Seven Media Asia	Wali Kota Jambi meraih penghargaan nasional pada award 25 Pemimpin Inspiratif Perubahan 2022	Jakarta, 24 Juni 2022	Wali Kota Jambi
11	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2021 (Untuk Pasar Mama)	Menteri Perdagangan RI	Kota Jambi meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2021 untuk Pasar Mama	Jakarta, 16 Juni 2022	Walikota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
12	Ajang Kespro Kawula Muda (AKuKaMu) 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih penghargaan Ajang Kespro Kawula Muda (AKuKaMu) 2022 pada Lomba Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jambi dalam rangka Harganas ke-29 Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Zul Fikri
13	Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Penyuluh KB PNS Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Petugas Lapangan KB Non PNS Kota Jambi meraih Penghargaan atas Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Penyuluh KB PNS Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jambi dalam rangka Harganas ke-29 Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Pestaria Munthe, S.E
14	Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Penyuluh KB Non PNS Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Petugas Lapangan KB Non PNS Kota Jambi meraih Penghargaan atas Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Penyuluh KB Non PNS Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jambi dalam rangka Harganas ke-29 Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Apdariza Erlim, S.H
15	Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD) Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan atas Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD) perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dalam rangka Harganas ke-29 Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Kartini
16	Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Penilaian Pasangan KB Lestari 20 Tahun Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara III Tingkat Nasional) atas Penilaian Pasangan KB Lestari 20 Tahun perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dalam rangka Harganas ke-29 Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Hermansyah/Wahyuni



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
17	Lomba Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi Jambi tahun 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara I Lomba Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Kampung Maju Bersama
18	Lomba Video Edukasi Kependudukan melalui media sosial tingkat Provinsi Jambi 2022	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara I dan II Lomba Video Edukasi Kependudukan melalui media sosial tingkat Provinsi Tahun 2022	Jambi, 30 Juni 2022	Sindy Wilya Putri dan Lala Novia Haris
19	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara II dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jambi, 30 Juni 2022	Berkah
20	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara III dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Jambi, 30 Juni 2022	Khatalia
21	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara II dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jambi, 30 Juni 2022	Berkah
22	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Pendidikan	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara I dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Pendidikan	Jambi, 30 Juni 2022	Gemintang



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
23	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Masyarakat	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara II dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Masyarakat	Jambi, 30 Juni 2022	Kirana
24	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Keluarga Teladan	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara II dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Keluarga Teladan	Jambi, 30 Juni 2022	Fachrizal/Nurbaiti
25	Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan Juara I dalam Kegiatan Pembinaan dan Apresiasi POKTAN Unggulan Tahun 2022 Kategori Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jambi, 30 Juni 2022	Cempaka Putih
26	Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kota Jambi meraih Penghargaan Nasional Kalpataru dalam Kategori Perintis Lingkungan	2022	Leni Haini
27	Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2022	Kementerian Dalam Negeri	Kota Jambi meraih Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2022	2022	Partinem
28	Piagam Penghargaan sebagai Kota Layak Anak Peringkat Nindya Tahun 2022	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Kota Jambi meraih Penghargaan Sebagai Kota Layak Anak Peringkat Nindya Tahun 2022	Jakarta, 23 Juli 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
29	Penghargaan Tertinggi Peringkat 5 (Lima) Bidang Kepegawaian Tingkat Nasiona dalam ajang BKN Award Tahun 2022 untuk Pemerintah Kota Tipe Besar	Badan Kepegawaian Negara	Kota Jambi berhasil meraih Peringkat 5 pada Penghargaan Peringkat Tertinggi Bidang Kepegawaian Tingkat Nasiona dalam ajang BKN Award Tahun 2022 untuk Pemerintah Kota Tipe Besar	Banten, 21 Juli 2022	Pemerintah Kota Jambi
30	Penghargaan sebagai Kota Paling Berkelanjutan kesembilan belas di Indonesia pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2022	UI Green Metric	Kota Jambi berhasil meraih Penghargaan sebagai Kota Paling Berkelanjutan kesembilan belas di Indonesia pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2022	Jakarta, 21 Juli 2022	Pemerintah Kota Jambi
31	Juara I Nasional LKP TUK Berprestasi Seluruh Indonesia Tahun 2022		Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam Pendidikan Non Formal berhasil meraih Juara I Nasional bidang Tata Rias Penganten LKP TUK Nasional Tahun 2022	Jakarta, 30 Juli 2022	
32	Apresiasi Peningkatan Layanan Kekayaan Intelektual	Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI	Kota Jambi mendapatkan Apresiasi Peningkatan Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2022	Jakarta, 2022	Walikota Jambi
33	BKN Award kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.	Kepala BKN RI	Kota Jambi berhasil meraih penghargaan di Bidang Kepegawaian melalui BKN Award kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.	Palembang, 3 September 2022	Pemerintah Kota Jambi
34	Juara 1 pada Indonesia Water Forum Award dalam kategori sedang	Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)	PDAM Tirta Mayang Kota Jambi berhasil meraih Juara 1 pada Indonesia Water Forum Award dalam kategori sedang	Jakarta, 5-6 Oktober 2022	Dirut PDAM Tirta Mayang, Wakil Walikota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
35	Juara 1 Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022	Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022	Jambi, 7 Oktober 2022	Pemerintah Kota Jambi
36	Penghargaan Proklamasi Lestari Tahun 2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Kota Jambi meraih penghargaan pada Proklamasi Lestari Tahun 2022	Jakarta, 13 Oktober 2022	Pemerintah Kota Jambi
37	Kota Jambi meraih penghargaan Piagam Kementerian Keuangan atas Capaian 6 Kali WTP dan Plakat atas Capaian Minimal 5 Kali berturut-turut meraih Opini WTP	Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani	Kota Jambi meraih penghargaan Piagam Kementerian Keuangan atas Capaian 6 Kali WTP dan Plakat atas Capaian Minimal 5 Kali berturut-turut meraih Opini WTP	Jambi, 19 Oktober 2022	Pemerintah Kota Jambi
38	Terbaik I Capaian Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan Terbaik I Capaian Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022	Jambi, 26 Oktober 2022	Pemerintah Kota Jambi
39	Juara 1 (Umum) MTQ Ke-51 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022	Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 (Umum) MTQ Ke-51 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022	Sungai Penuh, 6 November 2022	Pemerintah Kota Jambi
40	Juara 1 (Umum) Stand Terbaik Dekranasda Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022	Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 (Umum) Stand Terbaik Dekranasda Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022	Sungai Penuh, 6 November 2022	Pemerintah Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
41	Terbaik 3 Capaian terbaik Pelayanan KB Kategori Metode Operasi Wanita (MOW) dalam Rangka TNI Manunggal Bangsa Kencana-Kesehatan Terpadu (TMKK) dan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022	BKKBN Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih terbaik 3 pada Capaian terbaik Pelayanan KB Kategori Metode Operasi Wanita (MOW) dalam Rangka TNI Manunggal Bangsa Kencana-Kesehatan Terpadu (TMKK) dan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022	Jambi, 20 November 2022	DPPKB Kota Jambi
42	Terbaik 3 Capaian terbaik Pelayanan KB Kategori Per Mix Kontrasepsi dalam Rangka TNI Manunggal Bangsa Kencana-Kesehatan Terpadu (TMKK) dan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022	BKKBN Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Terbaik 3 pada Capaian terbaik Pelayanan KB Kategori Per Mix Kontrasepsi dalam Rangka TNI Manunggal Bangsa Kencana-Kesehatan Terpadu (TMKK) dan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022	Jambi, 20 November 2022	DPPKB Kota Jambi
43	Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan (STBM)	Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono	Kota Jambi meraih Penghargaan atas Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan	Jakarta, 23 November 2022	Pemerintah Kota Jambi
44	Kota Terbaik 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan (STBM) untuk Kategori Enabling Environment Tahun 2022	Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono	Kota Jambi meraih Penghargaan atas Kota Terbaik 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan untuk Kategori Enabling Environment Tahun 2022	Jakarta, 23 November 2022	Pemerintah Kota Jambi
45	Kota Jambi meraih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022	Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati	Kota Jambi meraih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022	Jakarta, 23 November 2022	Pemerintah Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
46	Penghargaan dan Apresiasi kepada Perpustakaan Umum Kota Jambi sebagai Terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Kota Jambi meraih Penghargaan dan Apresiasi kepada Perpustakaan Umum Kota Jambi sebagai Terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak dengan Peringkat Pertama	Jakarta, 25 November 2022	DKP, Pemerintah Kota Jambi
47	Penghargaan, Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2022.	Wakil Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih peringkat 1 Penghargaan, Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2022.	Jambi, 28 November 2022	DKP, Pemerintah Kota Jambi
48	Pemecahan REKOR DUNIA MURI oleh Pemerintah Kota Jambi untuk Kompetisi Tabuh Kompangan dengan Grup Peserta Terbanyak di Indonesia dan Dunia	Rekor MURI	Pemecahan REKOR DUNIA MURI oleh Pemerintah Kota Jambi untuk Kompetisi Tabuh Kompangan dengan Grup Peserta Terbanyak di Indonesia dan Dunia	Jambi, 28 November 2022	Kota Jambi
49	Pemerintah Kota Jambi berhasil mendapatkan penghargaan atas keikutsertaan kota / kabupaten terpilih pada Smart City Expo' 2022, bersama Kota Bandung dan Kabupaten Kutai Kartanegara.	Dirjen APTIKA Samuel Abrijani Pengerapan dan Direktur LAIP Kemkominfo, Bambang Dwi Anggono.	Pemerintah Kota Jambi berhasil mendapatkan penghargaan atas keikutsertaan kota / kabupaten terpilih pada Smart City Expo' 2022, bersama Kota Bandung dan Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jakarta, 30 November 2022	Pemerintah Kota Jambi
50	Pemecahan REKOR DUNIA MURI oleh Pemerintah Kota Jambi untuk Edukasi Anti Korupsi Kepada Pelajar	Rekor MURI	Pemecahan REKOR DUNIA MURI oleh Pemerintah Kota Jambi untuk Edukasi Anti Korupsi Kepada Pelajar Terbanyak dengan Permainan Cengklung	Jambi, 30 November 2022	Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
	Terbanyak dengan Permainan Cengkling				
51	Dinas Kesehatan Kota Jambi ditetapkan sebagai perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan TERBAIK NASIONAL dari kementerian kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Jambi ditetapkan sebagai perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan TERBAIK NASIONAL dari kementerian kesehatan	Bali, 30 November 2022	Dinas Kesehatan
52	Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha menerima penghargaan Anugerah Dwija Praja Nugraha dari Presiden RI pada puncak acara Peringatan HUT 77 Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional	Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo	Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha menerima penghargaan Anugerah Dwija Praja Nugraha dari Presiden RI pada puncak acara Peringatan HUT 77 Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional	Semarang, 2 Desember 2022	Walikota Jambi
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meraih Penghargaan 10 Besar Perpustakaan Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Perpusnas	Perpustakaan Nasional	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meraih Penghargaan 10 Besar Perpustakaan Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Perpusnas	Surabaya, 7 Desember 2022	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
54	Pemerintah Kota Jambi meraih Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021	Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly	Pemerintah Kota Jambi meraih Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021	Jakarta, 12 Desember 2022	Pemerintah Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
55	Kota Jambi meraih Penghargaan sebagai Camat Teladan Terbaik III Tingkat Provinsi Jambi pada Camat Paal Merah Kota Jambi	Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan sebagai Camat Teladan Terbaik III Tingkat Provinsi Jambi pada Camat Paal Merah Kota Jambi	Jambi, 13 Desember 2022	Pemerintah Kota Jambi
56	Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha menerima penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2022 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI	Wakil Presiden RI, K.H Ma'ruf Amin	Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha menerima penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2022 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI	Jakarta, 21 Desember 2022	Walikota Jambi
57	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan sebagai Pembina Terbaik Penganugerahan Siddhakarya Tingkat Provinsi Jambi	Gubernur Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan sebagai Pembina Terbaik Penganugerahan Siddhakarya Tingkat Provinsi Jambi	Jambi, 22 Desember 2022	Pemerintah Kota Jambi
58	Pencatatan dan Pelaporan Terbaik pada Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2022	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan pada Kategori Pencatatan dan Pelaporan Terbaik pada Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2022	Jambi, 27 Desember 2022	Pemerintah Kota Jambi
59	Kota Jambi meraih Penghargaan pada Kategori Pelaksanaan Terbaik pada Verifikasi Data Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2022	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan pada Kategori Pelaksanaan Terbaik pada Verifikasi Data Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2022	Jambi, 27 Desember 2022	Pemerintah Kota Jambi



NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	Penerima
1	2	3	4	5	6
60	Apresiasi kepada Syafrini, S.P., M.E sebagai Pengelola Data dan Informasi Terbaik pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	Apresiasi kepada Syafrini, S.P., M.E sebagai Pengelola Data dan Informasi Terbaik pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022	Jambi, 27 Desember 2022	Pemerintah Kota Jambi
61	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Lagu a.n. Rd Irwansyah	Gubernur Provinsi Jambi	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Lagu a.n. Rd Irwansyah	Jambi, 06 Januari 2023	Kota Jambi
62	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Naskah a.n. Aliu Surachman	Gubernur Provinsi Jambi	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Naskah a.n. Aliu Surachman	Jambi, 06 Januari 2023	Kota Jambi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Syarif Fasha, M.E.

Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2022

Walikota Jambi

Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	3%
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan Yang Berkelanjutan	3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	6,40%
		4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,74
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,61
		6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,14
		7	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	8	Indeks Pembangunan Manusia	77,94

PROGRAM	ANGGARAN MURNI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 303.431.570.986
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 220.603.291.769
Program Pengembangan Kurikulum	Rp 28.919.870
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 79.392.800
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp 137.225.407
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 190.616.739.905
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 72.151.452.787
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 994.998.942
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 277.712.957
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 240.461.175
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.318.574.260
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp 28.191.108.890
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 9.959.233.620
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 1.776.792.025
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.947.696.967
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.358.967.500
Program Pengembangan Permukiman	Rp 40.356.447.267
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 141.058.526.400
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 5.748.207.221
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 53.707.969.400
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 1.949.998.949
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.947.563.300
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.306.785.549
Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.070.253.191
Program Kawasan Permukiman	Rp 5.811.770.558
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp 26.652.915.983
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 22.619.495
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.688.431.080
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 6.413.019.230
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.661.855.000
Program Penanggulangan Bencana	Rp 691.847.331
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 4.586.497.669
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.429.076.967
Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.659.895.670
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 85.158.310
Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.290.583.581
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 1.169.925.840
Program Penanganan Bencana	Rp 737.709.710
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.038.175.132
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 49.539.759
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 424.131.504

Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	237.924.583
Program Hubungan Industrial	Rp	1.018.848.378
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11.196.532.357
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	14.776.080
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.672.867.687
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	7.465.489.900
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp	177.381.969
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp	344.011.111
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	166.540.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	123.060.201
Program Pengelolaan Persampahan	Rp	32.151.754.977
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.922.565.812
Program Pendaftaran Penduduk	Rp	273.423.290
Program Pencatatan Sipil	Rp	339.207.215
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	2.282.638.401
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	32.574.960
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.127.574.250
Program Penataan Desa	Rp	715.326.853
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	235.301.750
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	184.608.150
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	5.026.547.147
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.205.928.039
Program Pengendalian Penduduk	Rp	220.424.679
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp	3.970.117.858
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp	2.241.539.146
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.394.668.715
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp	9.995.525.885
Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	156.305.400
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.090.627.700
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	4.357.467.412
Program Aplikasi Informatika	Rp	3.447.491.990
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.333.187.391
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	71.323.400
Program Promosi Penanaman Modal	Rp	233.758.660
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	1.069.593.771
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	659.249.019
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	47.222.759
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.944.185.204
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	1.523.330.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	6.197.379.180
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.157.005.616
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.863.758.750
Program Pengelolaan Arsip	Rp	1.685.499.597

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp	392.546.474
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	12.895.179
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.048.227.304
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	1.882.691.845
Program Pemasaran Pariwisata	Rp	1.283.087.131
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	121.405.170
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	873.688.550
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	14.444.429.070
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	536.915.840
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	1.253.499.604
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.166.285.714
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	591.789.831
Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	97.214.300
Program Penyuluhan Pertanian	Rp	328.123.709
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.216.467.515
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	617.748.888
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.772.979.463
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	800.916.523
Program Pengembangan Ekspor	Rp	69.247.515
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	117.454.090
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	843.086.006
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	35.402.471.406
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	26.629.548.836
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	3.385.669.344
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	44.510.247.154
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp	29.599.221.710
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.831.484.010
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.783.001.230
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.562.224.438
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.968.862.235
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	33.286.231.386
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.872.144.098
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	27.314.627.307
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.180.090.315
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.078.749.671
Program Kepegawaian Daerah	Rp	6.558.314.274
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10.685.458.092
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	1.288.720.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	1.328.925.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.666.250.226
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	337.167.315
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	3.716.007.137
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	434.906.450

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	631.881.950
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.791.300.649
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	1.863.272.929
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	3.356.129.091
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	182.827.577
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	667.589.733
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.027.321.590
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	216.913.870
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	4.043.826.088
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	505.431.550
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	433.232.580
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.078.077.971
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	316.113.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	1.265.335.270
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	568.698.436
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	490.364.501
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.639.376.476
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	2.200.502.991
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	2.910.105.712
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	468.127.800
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	145.070.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.954.974.928
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	633.298.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	4.089.726.850
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	661.065.200
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	1.066.784.200
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.734.096.933
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	223.418.340
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	1.604.742.055
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	328.725.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	321.152.350
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.913.109.023
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	150.246.735
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	1.363.385.020
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	412.884.900
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	282.754.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.518.291.319
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	723.252.462
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	3.804.408.497
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	408.787.100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	350.295.300
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.521.760.225
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	379.413.810
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	3.092.734.243
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	386.041.800
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	211.284.600
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.945.599.451
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	180.227.290

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	4.313.437.387
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	414.234.550
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	483.636.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.430.575.934
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	315.403.000
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.487.851.066
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	716.650.000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	248.069.000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	134.651.000
TOTAL	Rp	1.773.747.078.885

Jambi, Januari 2022
Walikota Jambi



H. SYARIF FASHA, ME

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Syarif Fasha, M.E.

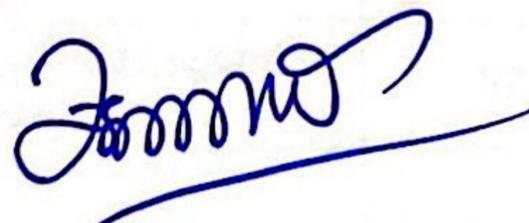
Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, November 2022

Walikota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
		2	Nilai SAKIP	B
		3	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (B)
2	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	84%
3	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan Perkotaan	5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63,31%
4	Meningkatnya Kualitas Air	6	Indeks Kualitas Air	39,9
5	Meningkatnya kualitas udara	7	Indeks Kualitas Udara	80,76
6	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,87
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9	Indeks Ketahanan Pangan	80
8	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
9	Meningkatkan Realisasi Investasi	11	Realisasi Investasi	498.35 M
10	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,8
11	Meningkatkan derajat kesehatan	13	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,81
12	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,38
13	Meningkatkan kesetaraan gender	15	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4
14	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	16	Indeks Pembangunan Pemuda	57,90

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan – Daerah Kabupaten/Kota	313.490.031.893,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	158.763.917.938,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	28.919.870,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	79.392.800,00
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	132.326.207,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.296.204.113,00
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.631.791.662,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.652.278.165,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	685.384.826,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.599.364,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.357.093.343,00
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	31.052.932.890,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.959.483.620,00
14	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.776.842.025,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.099.334.849,00
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.358.967.500,00
17	Program Pengembangan Permukiman	47.165.247.879,00
18	Program Penataan Bangunan Gedung	148.069.062.057,00
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.658.407.221,00
20	Program Penyelenggaraan Jalan	56.708.919.400,00
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.950.513.029,00
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.661.413.300,00
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.470.995.868,00
24	Program Pengembangan Perumahan	1.070.703.191,00
25	Program Kawasan Permukiman	5.812.315.558,00
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	29.389.501.042,00
27	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.619.495,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.140.851.793,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.202.807.820,00
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.931.015.360,00
31	Program Penanggulangan Bencana	696.420.693,00
32	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.587.076.469,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.098.601.978,00
34	Program Pemberdayaan Sosial	1.660.545.670,00
35	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	85.208.310,00
36	Program Rehabilitasi Sosial	1.291.283.581,00
37	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.126.175.808,00
38	Program Penanganan Bencana	737.859.710,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.815.862.516,00
40	Program Perencanaan Tenaga Kerja	105.605.512,00
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.424.947.159,00
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	204.630.599,00
43	Program Hubungan Industrial	376.189.361,00
44	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	765.422.308,00
45	Program Perlindungan Perempuan	365.119.900,00
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	173.310.200,00
47	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	262.520.254,00
48	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	338.626.759,00
49	Program Perlindungan Khusus Anak	604.606.251,00
50	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442.726.150,00
51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	98.996.110,00
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	493.154.756,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.736.817.156,00
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	14.776.080,00
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.828.778.165,00
56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.783.655.760,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100.130.521,00
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	375.281.111,00
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	166.530.405,00
60	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	123.154.601,00
61	Program Pengelolaan Persampahan	32.101.551.442,00
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.171.722.929,00
63	Program Pendaftaran Penduduk	273.673.290,00
64	Program Pencatatan Sipil	339.557.215,00
65	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.213.547.694,00
66	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.875.031.975,00
68	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.655.201.552,00
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.398.661.456,00
70	Program Pengendalian Penduduk	250.971.951,00
71	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.697.299.991,00
72	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.825.447.106,00
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.675.873.466,00
74	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	11.990.483.959,00
75	Program Pengelolaan Pelayaran	156.305.400,00
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.199.463.343,00
77	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.842.432.286,00
78	Program Aplikasi Informatika	3.695.591.990,00
79	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	33.443.984,00
80	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	592.859.498,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
81	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	148.033.430,00
82	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	3.319.837.164,00
83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.159.765.737,00
84	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.323.400,00
85	Program Promosi Penanaman Modal	233.758.660,00
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.968.349,00
87	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	659.549.441,00
88	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.222.759,00
89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.125.760.200,00
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.494.830.000,00
91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.568.074.180,00
92	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.139.930.616,00
93	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.317.516,00
94	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.800.300,00
95	Program Pengembangan Kebudayaan	949.199.222,00
96	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	97.296.190,00
97	Program Pembinaan Sejarah	121.404.970,00
98	Program Pembinaan Perpustakaan	820.320.613,00
99	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	109.413.515,00
100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.653.390.978,00
101	Program Pengelolaan Arsip	736.843.362,00
102	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	265.435.828,00
103	Program Perizinan Penggunaan Arsip	7.482.679,00
104	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	73.255.200,00
105	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	439.175.881,00
106	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	97.214.413,00
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.158.035.410,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
108	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	988.777.564,00
109	Program Pemasaran Pariwisata	1.185.940.647,00
110	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.038.998.820,00
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.566.059.712,00
112	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.966.977.449,00
113	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	70.000.000,00
114	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	930.057.165,00
115	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	104.232.560,00
116	Program Penyuluhan Pertanian	413.336.845,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.647.271.847,00
118	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	89.524.300,00
119	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.561.135.229,00
120	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.017.773.446,00
121	Program Pengembangan Ekspor	79.347.196,00
122	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	117.554.090,00
123	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	989.779.458,00
124	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.479.327.215,00
125	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	63.744.234,00
126	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	48.642.985,00
127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.816.816.728,00
128	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	26.511.730.716,00
129	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.941.259.344,00
130	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.453.209.450,00
131	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	37.349.313.539,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.342.161.253,00
133	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.121.299.264,00
134	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.211.019.387,00
135	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.246.364.997,00
136	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.538.905.228,00
137	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.180.555.039,00
138	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.659.284.219,00
139	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.472.225.738,00
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.733.062,00
141	Program Kepegawaian Daerah	2.259.913.048,00
142	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.294.131.175,00
143	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	683.358.616,00
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.209.047.866,00
145	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.227.345.000,00
146	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.126.175.000,00
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.939.737.978,00
148	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	333.717.315,00
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.216.007.137,00
150	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	463.900.450,00
151	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	526.264.450,00
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.277.776.772,00
153	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.994.331.129,00
154	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.926.121.740,00
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	227.608.377,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
156	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	643.972.533,00
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.306.421.286,00
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	217.213.870,00
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.743.826.088,00
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	525.085.150,00
161	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	368.032.580,00
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.501.165.103,00
163	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	313.651.000,00
164	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.665.335.270,00
165	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	582.387.635,00
166	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	460.157.301,00
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.842.041.770,00
168	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.324.853.111,00
169	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.410.106.592,00
170	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	499.671.800,00
171	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	211.252.500,00
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.691.195.226,00
173	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.851.500,00
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.989.726.850,00
175	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	694.050.900,00
176	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.288.711.700,00
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.949.023.879,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
178	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.423.140,00
179	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.095.742.054,00
180	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	364.884.998,00
181	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	339.971.499,00
182	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.137.512.507,00
183	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	147.758.735,00
184	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.963.385.022,00
185	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.649.700,00
186	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.413.500,00
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.937.564.648,00
188	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	691.880.276,00
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.304.408.497,00
190	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	430.189.000,00
191	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351.895.300,00
192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.741.567.172,00
193	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	420.678.810,00
194	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.592.715.446,00
195	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	433.035.800,00
196	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.121.450,00
197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.325.739.801,00
198	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	128.761.090,00
199	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.798.437.387,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
20	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.228.550,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	463.234.099,00
202	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.084.228,00
203	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	315.403.000,00
204	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.487.851.066,00
205	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	716.650.000,00
206	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	248.069.000,00
207	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	134.651.000,00
TOTAL		1.812.932.658.629,00

Jambi, November 2022
Walikota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.